

FENOMENA KEMISKINAN MASYARAKAT KOTA DUMAI

Oleh:
Dedy Rachmad¹

Abstrak

Kemiskinan merupakan masalah yang telah ada sejak zaman dahulu, tidak terkecuali di Indonesia umumnya dan kota Dumai khususnya. Kota Dumai adalah salah satu daerah yang berkembang di Propinsi Riau dengan sumber daya alam yang berpotensi. Namun demikian, kekayaan alam tersebut tidak diiringi dengan berkurangnya angka kemiskinan, melainkan meningkatnya jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Tulisan ini menguraikan faktor penyebab kemiskinan di Kota Dumai. Tulisan ini juga menjelaskan kebijakan Pemerintah Kota Dumai yang diaplikasikan melalui program memberantas kemiskinan di tempat kajian. Penelitian yang dilakukan bersumber dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menjelaskan bahwa program kebijakan Pemerintah Kota Dumai dalam memberantas kemiskinan dilakukan melalui tiga bidang pembangunan, yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Sektor pendidikan diarahkan kepada sekolah unggulan tingkat Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Biaya sekolah secara gratis diberikan kepada anak-anak di 4 (empat) tingkat pendidikan tersebut. Adapun sektor kesehatan diberikan secara gratis kepada penduduk miskin yang ingin berobat ke Puskesmas. Layanan di rumah sakit umum daerah juga diberikan secara gratis untuk masyarakat miskin. Sedangkan dalam bidang ekonomi, penduduk miskin diberikan bantuan berupa beras, santunan bagi warga yang keluarganya meninggal dunia, fasilitas rumah layak huni secara bertahap dan bantuan uang pada hari-hari besar keagamaan.

Kata Kunci: *Kemiskinan, Upaya Pemerintah Kota*

¹ Dosen Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Imam Asy Syafii Pekanbaru Email: dedyrachmad@yahoo.com

A. PENDAHULUAN

Sepanjang sejarah Indonesia, kemiskinan menjadi masalah yang serius. Hampir seluruh tenaga ahli telah dikerahkan untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut. Kemiskinan telah menyebabkan banyak masyarakat Indonesia tidak dapat menaikkan taraf hidupnya sehingga hidup dalam keterbelakangan, seperti banyak anak-anak yang tidak bisa mengikuti pendidikan secara layak dan berkualitas, penduduk miskin yang tidak mampu untuk berobat, kurangnya sarana dan prasarana umum masyarakat, terbatasnya peluang pekerjaan, kurangnya jaminan sosial bagi keluarga miskin dan lain sebagainya. Lebih parah lagi, kemiskinan di Indonesia menyebabkan banyak orang miskin sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Kemiskinan di Indonesia telah menimbulkan banyak masalah baru dan menyebabkan banyak orang yang akhirnya berperilaku tidak baik, seperti mencuri, membunuh, dan lain sebagainya. Orang miskin rela mempertaruhkan tenaganya membuat barang untuk keuntungan orang kaya, dan banyak dari kalangan buruh yang bekerja seharian hanya untuk mendapatkan sekeping uang untuk makan. Malah, kemiskinan telah membuat masyarakat Indonesia terjebak dalam budaya meminta, mengemis, budaya kebergantungan (*dependency*), khususnya menggantungkan harapan hidupnya dari budi baik pemerintah melalui pemberian bantuan.

Keadaan tersebut di atas seolah menjadi sebuah fenomena yang tidak ada kesudahannya. Masyarakat umumnya beranggapan bahwa pemerintah Indonesia tidak serius dalam menangani masalah kemiskinan, bahkan pemerintah dinilai tidak perhatian terhadap nasib masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.

Kajian dalam penelitian ini adalah tentang kemiskinan. Pembahasan dimulai dari kemiskinan di Indonesia yang menjadi satu topik pembangunan untuk jangka waktu yang panjang sebelum diberlakukannya otonomi

daerah. Pada saat itu, angka kemiskinan di Indonesia mencapai 24,2 persen dibandingkan

dengan 17,7 persen di masa otonomi daerah tahun 2006. Angka tersebut masih sangat besar jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai lebih kurang 253.609.643 jiwa (Detik Finance, Mei 2014)

Kesenjangan pendapatan (*income inequality*) menjadi faktor utama terjadinya kemiskinan nasional yang semakin meluas. Kemiskinan berdampak bukan hanya kepada perorangan, namun juga antar sektor, kelompok dan wilayah. Data Bank Dunia menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2002 mencapai 60 persen. Hal ini disebabkan ketidakmampuan pemerintah dalam mengakses sumber-sumber permodalan, sarana dan prasarana yang mendukung masyarakat untuk memperbaiki kehidupannya, serta lemahnya pegawai pemerintah dalam mengelola sumber daya alam yang ada. (www.ismailrasulong.wordpress.com).

Angka kemiskinan yang besar tersebut menuntut Pemerintah Pusat melaksanakan sistem „desentralisasi“ atau yang lebih dikenal dengan istilah „otonomi daerah“. Pendekatan pendapatan dan pengembangan sumber daya manusia adalah antara pola kerja otonomi daerah yang diperlukan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Selain itu, pendekatan budaya, perilaku dan keadaan yang ada pada masyarakat miskin, seperti meningkatkan kerja juga diperlukan dalam mengurangi angka kemiskinan. Oleh sebab itu, melalui sistem otonomi daerah ini diperlukan langkah-langkah nyata dalam investasi sosial, seperti membangun nilai budaya atau aktivitas yang positif, menghilangkan kemalasan, memanfaatkan waktu luang serta mencari kebijakan baru agar negara Indonesia dapat keluar dari lingkaran kemiskinan.

Kota Dumai, merupakan salah satu daerah kaya di propinsi Riau yang telah menjadi kotamadya dan memisahkan diri dari kabupaten Bengkalis sejak tahun 1999. Pada tahun 2012, angka kemiskinan di Kota Dumai mencapai 10,76 persen atau setara dengan 305.838 jiwa, lalu meningkat menjadi 13,46 persen tahun 2014 (Sensus Penduduk Tahun 2014).

Angka kemiskinan yang besar di Kota Dumai sebelum dilaksanakannya otonomi daerah adalah disebabkan oleh pembangunan perencanaan yang berjalan sepihak, yaitu kebijakan yang dibuat oleh pihak Pemerintah Kota Dumai tidak melihat kepada keadaan masyarakat sekitar. Kebijakan ini dinilai tidak sejalan dengan keadaan terkini masyarakat di Kota Dumai, karena banyaknya program yang dibuat Pemerintah Kota tidak mencerminkan keadaan dan kepentingan yang berpihak untuk masyarakat miskin di Kota Dumai. Ditambah lagi dengan beberapa program yang telah dirancang secara baik, namun dalam pelaksanaannya tidak tepat sasaran.

Pada saat sistem otonomi daerah diperkenalkan tahun 1999, Pemerintah Kota Dumai belum melakukan perencanaan pembangunan yang bersifat *bottom-up*, yaitu melihat keadaan terkini masyarakat lokal untuk kemudian dibuat satu kebijakan yang tepat. Hal tersebut masih bersifat *top-down*, yaitu pembangunan dari pihak pemerintah kepada masyarakat secara sepihak. Cara tersebut jelas memperlihatkan „ketidakselarasan“ program yang dibuat oleh Pemerintah Kota Dumai dengan keadaan terkini masyarakat miskin di kawasan tersebut. Hal ini menyebabkan kebijakan Pemerintah Kota Dumai sulit untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam usahanya menaikkan taraf hidup masyarakat miskin.

Berdasarkan potensi sumber daya alam yang besar yang dimiliki oleh Kota Dumai dan meningkatnya angka kemiskinan pada setiap tahun di daerah tersebut telah mendorong peneliti untuk membuat kajian secara lebih mendalam tentang faktor penyebab kemiskinan di Kota Dumai dan upaya Pemerintah Kota Dumai untuk memberantas kemiskinan di kawasan tersebut melalui penelitian tentang “Fenomena Kemiskinan Masyarakat Kota Dumai”.

B. RUMUSAN MASALAH

Untuk mencapai setiap objektif kajian, beberapa persoalan kajian yang membentuk arah kajian dinyatakan sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan di Kota Dumai?
2. Bagaimanakah Pemerintah Kota berupaya memberantas kemiskinan di Kota Dumai?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, kajian ini secara umum bertujuan menilai aspek kebijakan Pemerintah Kota dalam usahanya memberantas kemiskinan di Kota Dumai. Untuk itu, penelitian ini terlebih dahulu akan mengetahui sebab-sebab kemiskinan di Kota Dumai. Hal ini berfungsi sebagai alat analisis untuk meneliti realita keberhasilan dan kegagalan Pemerintah Kota Dumai dalam usahanya mengentaskan kemiskinan di tempat kajian.

Secara lebih khusus, terdapat 2 (dua) objektif kajian yang ingin dicapai, yaitu:

1. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan di Kota Dumai. Hal ini sangat penting melihat kepada latar belakang kajian yang berawal dari faktor kemiskinan di Kota Dumai yang terus bertambah setelah era otonomi daerah.
2. Menganalisis kinerja Pemerintah Kota melalui kebijakan program-programnya dalam memberantas kemiskinan secara nyata di Kota Dumai. Hal ini dilakukan untuk melihat kaitan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Dumai dengan aplikasinya di lapangan dalam menangani masalah kemiskinan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Secara umum, kajian tentang program mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia perlu dilakukan, hal ini karena banyak penduduk Indonesia yang sejak dahulu kala berada di bawah garis kemiskinan. Keadaan ini menyebabkan banyak warga Indonesia yang melakukan tindakan yang tidak semestinya, seperti mencuri, mengemis dan sebagainya.

Kajian tentang masalah kemiskinan di Kota Dumai juga perlu dilakukan, disebabkan Kota Dumai menjadi salah satu kota di Propinsi Riau yang mengalami perkembangan sejak menjadi Kotamadya. Namun demikian, perkembangan dan potensi yang dimiliki oleh Kota Dumai tidak sejalan dengan keadaan masyarakatnya, dimana angka kemiskinan setiap tahunnya terus meningkat.

Secara khusus, kajian tentang tinjauan penanganan Pemerintah Kota Dumai era otonomi daerah dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah perlu, karena program di era otonomi daerah memang dirancang oleh Pemerintah Pusat untuk diterapkan baik di pusat maupun di daerah agar angka kemiskinan dapat ditekan dan dikurangi di seluruh kawasan Nusantara.

Upaya Pemerintah Kota Dumai dalam mengurangi angka kemiskinan di kota tersebut juga perlu dilakukan, mengingat kebijakan Pemerintah Kota telah pun dilaksanakan namun belum memberikan hasil yang maksimal dalam menaikkan taraf hidup masyarakat miskin di Kota Dumai.

Kepentingan kajian ini diharapkan memberikan sumbangan yang positif terutama dalam memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat umumnya dan Pemerintah Daerah khususnya terhadap masalah kemiskinan. Selain itu, dapatan kajian diharapkan menghasilkan analisa yang terbaik untuk melihat sejauh mana keberhasilan program Pemerintah Kota Dumai memberikan dampak yang positif dalam memberantas kemiskinan di kawasan kajian terutama melalui evaluasi secara efektif dan efisien.

E. KONSEP UMUM KEMISKINAN

Definisi Kemiskinan

Kemiskinan mempunyai berbagai dimensi karena merupakan fenomena yang universal. Oleh karenanya, kemiskinan sangat luas dan mempunyai perspektif yang berbeda-beda menurut masyarakat yang mengalaminya. Tidak ada satu maksud kemiskinan khusus yang dapat diterima dan

digunakan oleh semua negara pada setiap masa tanpa memperhatikan struktur

masyarakat dan tahap pembangunan di negara berkenaan.

Secara umum, kemiskinan menggambarkan dan merangkumi berbagai keadaan sosial ekonomi. Kemiskinan merupakan satu sindrom situasi yang meliputi unsur-unsur kekurangan makanan dan taraf kesehatan yang rendah, pendapatan yang rendah, pengangguran, keadaan perumahan yang tidak layak, taraf pendidikan yang rendah, pekerjaan yang tidak terjamin, sikap hidup yang negatif dan fikiran yang kolot. Oleh karena itu, konsep kemiskinan tidak hanya terbatas pada kegagalan memenuhi kebutuhan kebendaan saja, tetapi juga kebutuhan rohani (Osman Rani Hassan dan Abdul Majid Salleh, 1988: 31).

Para pakar telah menjelaskan maksud dari kemiskinan berdasarkan bidang ilmu mereka masing-masing. Pakar ekonomi mendefinisikan kemiskinan dari perspektif jumlah pendapatan, pakar sosiologi pula mendefinisikannya dari perspektif budaya dan stratifikasi sosial masyarakat, sedangkan pakar kesehatan mendefinisikan kemiskinan dari perspektif zat dan kalori makanan. Definisi-definisi yang mereka kemukakan mempunyai dasar persamaan yang dapat dikedepankan dalam soal pendefinisian konsep kemiskinan, yaitu dari segi kekurangan baik kekurangan pendapatan, kekurangan zat makanan ataupun kekurangan yang lainnya. Semua ini menjelaskan bahwa kemiskinan adalah satu keadaan kekurangan (Amartya Sen, 1981: 22).

Namun demikian, definisi kemiskinan dari sudut kekurangan menimbulkan banyak persoalan karena konsep ini merupakan satu norma sosial yang fungsinya berbeda berdasarkan waktu dan tempat. Di samping itu, definisi tersebut juga berbeda berdasarkan keadaan masyarakat berkenaan. Kesemua itu tidak dapat menggambarkan fenomena tentang kenyataan kemiskinan antara satu masyarakat atau negara dengan masyarakat atau negara lainnya (Mohd. Taib Dora, 1997: 14).

Kebijakan dan strategi yang digunakan oleh sebuah negara dalam mengatasi masalah kemiskinan senantiasa berbeda berdasarkan fase pembangunan pada setiap waktunya. Di era tahun 1950-an dan 1960-an, penekanan

pembangunan diberikan kepada model pertumbuhan yang menekankan *investment and growth output* (Domar 1945, Harrod 1939, Lewis 1954, Solow 1957) dengan harapan hal itu dapat memberantas kemiskinan dan memperbaiki kualitas hidup. Sebaliknya, kemiskinan absolut meningkat, distribusi pendapatan menjadi parah dan tingkat pengangguran bertambah di kebanyakan negara-negara yang sedang membangun (Todaro, 1996: 14-15).

Pada era 1970-an pula, strategi yang ditekankan lebih kepada penyediaan kebutuhan dasar (*basic needs*) dan desas-desus kualitas kehidupan manusia yang meliputi kesehatan, pendidikan dan makanan serta reformasi agraria dan pembangunan desa terpadu. Ketika itu, perdebatan tentang pembangunan menjadi hangat karena kemiskinan tetap akut dan terus menerus (*persistence*).

Selanjutnya di era tahun 1980-an, dunia pada umumnya dilanda masalah krisis ekonomi dan kebanyakan negara sedang membangun terpaksa membuat penyesuaian struktur untuk mengurangi kesan krisis tersebut. Maka pada fase ini, penekanan berada pada peningkatan sistem pendistribusian program pemberantasan kemiskinan (Chamhuri Siwar dan Nor Aini Hj. Idris 1996: 22, Todaro 1996: 62-68).

Adapun pada era tahun 1990-an, Badan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Development Programme*) memperkenalkan satu teori pendekatan dalam mengkaji kemiskinan. Pendekatan yang digunakan adalah melalui pendekatan pembangunan manusia yang dijelaskan dalam bentuk Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*). Konsep ini pada mulanya diperkenalkan oleh ahli ekonomi Pakistan bernama Mahbub al-Haq. Konsep tersebut mencakup indeks tingkat pendidikan, indeks harapan hidup dan indeks keseimbangan kemampuan berbelanja (*Purchasing Power Parity*). Pendekatan ini tidak hanya mengkaji kemiskinan dari dimensi ekonomi (pendapatan), tetapi juga mencakup dimensi pendidikan (angka pandai membaca),

dan dimensi kesehatan (angka harapan hidup) (Edi Suharto, 2009).

Kemiskinan Dari Berbagai Perspektif

Kemiskinan juga merupakan multi-dimensi. Oleh karena itu, menurut sebagian ahli/sarjana, kemiskinan berkisar pada hal-hal sebagai berikut:

1. Kemiskinan sebagai kegagalan pribadi (*personal failing*)
2. Kemiskinan sebagai kegagalan struktural (*structural failing*)
3. Kemiskinan sebagai ciri-ciri budaya (*cultural characteristic*)
4. Kemiskinan sebagai penglabelan (*as label*)
5. Kemiskinan sebagai pemisah dan pembatas peluang-peluang (*restriction of opportunities*).

Kecenderungan para ahli terhadap kemiskinan sangatlah mendalam. Banyak dari mereka yang telah menguraikan maksud dan penyebab kemiskinan. Achmad Efendi (2011), menerangkan tentang persoalan kemiskinan penduduk dari berbagai perspektif. Dari perspektif sosiologi, Achmad menjelaskan bahwa kemiskinan diantaranya terjadi akibat terbatasnya interaksi sosial dan penguasaan informasi. Dari perspektif ekonomi pula, kemiskinan terjadi akibat terbatasnya alat produksi, kurangnya pendapatan, tawar menawar harga barang yang rendah, tidak adanya tabungan, dan lemahnya dalam menangkap peluang pekerjaan. Adapun dari perspektif psikologi, kemiskinan disebabkan perasaan rendah diri, malas dan perasaan terkucil dari kehidupan masyarakat. Sedangkan dari perspektif politik, kemiskinan berkaitan dengan terbatasnya berbagai kemudahan dan kesempatan, diskriminasi, dan kedudukan yang lemah dalam proses menentukan keputusan.

Soerjono Soekanto (2011), menyatakan bahwa dari perspektif sosiologi, kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup untuk menjaga dan memelihara dirinya dalam

kehidupan berkelompok, serta tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun

fisiknya. Dalam tulisan sebelumnya, Soerjono Soekanto (1995: 406) berpendapat bahwa kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.

Amartya Sen (2011), pemenang hadiah Nobel Prize menyebutkan bahwa dari perspektif ekonomi, kemiskinan dikategorikan sebagai tidak mempunyai pengetahuan dan keahlian yang baik dari diri seseorang. Hal ini disebabkan pendidikan yang rendah. Dari perspektif politik pula, kemiskinan ditandai dengan terbatasnya ruang untuk ikut serta dalam program politik baik dalam menentukan kebijakan partai maupun sebagai peserta. Kemiskinan menurut Amartya Sen juga diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang paling dasar.

Menurut tokoh Islam kontemporer, al-Ghazali (1994), bahwa kemiskinan ialah seseorang yang bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup baik kebutuhan hidup sendiri maupun keluarga. Dari perspektif Islam, kemiskinan terbagi kepada dua: (i) kemiskinan spiritual, yaitu miskin dari segi rohani disebabkan kurang melakukan amal ibadah, seperti shalat, mengaji dan yang lainnya, dan (ii) kemiskinan kebendaan, yaitu miskin dari segi material, seperti tidak pernah bersedekah, berzakat dan lain sebagainya. Alquran & Hadis banyak menyentuh kedua unsur ini.

Para ahli lainnya yang mendefinisikan kemiskinan adalah John Friedman (1979). Beliau menguraikan bahwa kemiskinan ialah ketidaksetaraan kesempatan untuk mengakumulasi dasar kekuasaan sosial, seperti modal produksi, sumber keuangan, organisasi sosial dan politik. Oleh karena itu disebutkan bahwa kemiskinan berkaitan dengan aspek sosial dan aspek sumber daya alam. Menurut Jeremy (2006: 20) pula, kemiskinan adalah suatu keadaan kekurangan yang absolut atau tidak adanya persediaan kebutuhan pokok bagi

seseorang untuk bertahan hidup. Suatu penduduk dikatakan miskin apabila ditandai

oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya yang serba kekurangan.

Sedangkan Nugroho, Iwan dan Dahuri (2004: 165-168) menyatakan bahwa kemiskinan merupakan keadaan absolut dan relatif yang menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tertentu tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk kebutuhan dasar sesuai dengan tata nilai atau norma tertentu yang berlangsung di dalam masyarakat, dikarenakan sebab-sebab yang bersifat alami (natural), kultural dan struktural.

Kemiskinan struktural terjadi disebabkan terbatasnya kualitas sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Kemiskinan struktural disebabkan secara langsung maupun tidak langsung oleh berbagai aturan atau undang-undang dan keputusan dalam pembangunan. Kemiskinan ini pada umumnya dapat dikenal melalui transformasi ekonomi yang berjalan tidak seimbang.

Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang lebih banyak disebabkan oleh sikap individu dalam suatu masyarakat tertentu yang mencerminkan gaya hidup, perilaku atau budaya yang menjebak dirinya dalam kemiskinan. Dengan perkataan lain, seseorang dikatakan miskin jika pendapatannya berada pada tingkatan yang tidak memungkinkan bagi orang tersebut untuk mentaati tata nilai dan norma dalam masyarakat. Tokoh utama yang membicarakan "*culture of poverty*" ini ialah Oscar Lewis dalam banyak tulisannya. Beliau menjelaskan bahwa kemiskinan bukan sekedar masalah kelumpuhan ekonomi, disorganisasi atau kelangkaan sumber daya manusia, namun kemiskinan juga dalam beberapa aspek bersifat positif karena memberikan solusi bagi kaum miskin untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidupnya.

Dadang Juliantara (2004: 140), menguraikan lima faktor yang dianggap berkaitan langsung dengan fenomena kemiskinan, yaitu: (1) Kapasitas sumber pertanian yang rendah, (2) Lokasi yang

terpencil dan terbatasnya sarana dan prasarana fisik, (3) Terbatasnya penguasaan modal dan teknologi, (4) Lemahnya kemampuan lembaga resmi dan tidak resmi sebagai penunjang pembangunan, (5) dan rendahnya akses sosial masyarakat terhadap peluang bisnis yang ada.

Adapun definisi kemiskinan menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) adalah keadaan dimana seseorang atau kelompok baik laki-laki maupun perempuan tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan air bersih, serta tidak mempunyai akses untuk memperoleh pendidikan dan pekerjaan yang layak bagi mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bermasyarakat.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengartikan kemiskinan sebagai besaran rupiah atau uang yang dibelanjakan untuk keperluan konsumsi yang kurang dari 2.100 kalori per kapita. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga menjelaskan bahwa sebuah keluarga dikatakan miskin jika tidak dapat melaksanakan ibadah secara baik karena sakit, tidak mampu makan dua kali dalam satu hari, tidak cukup pakaian, pendapatan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan memiliki rumah tempat tinggal yang tidak layak.

Ciri-Ciri dan Dimensi Kemiskinan

Dari berbagai definisi yang telah dijelaskan di atas, dapat diambil kesimpulan tentang ciri-ciri kemiskinan sehingga dapat memudahkan untuk pengukuran dan cara mengatasinya. Menurut Jeremy (2006), kemiskinan terbagi kepada dua, yaitu:

1. Kemiskinan absolut, ialah kemiskinan seseorang karena tidak mempunyai harta benda. Termasuk dalam kategori ini adalah orang yang hidupnya senantiasa berada dalam kesusahan. Diumpamakan orang miskin absolut adalah orang yang tua renta, kurus kering dan kuyu, melarikan diri dari zona perang di Afrika Tengah atau badai topan di Asia Tenggara dan orang yang berada di wilayah kering

seperti Zimbabwe atau Ethiopia yang secara lahir nampak kurus, terbujur

dan tidak berdaya karena kekurangan gizi sehingga dihinggapi lalat.

2. Kemiskinan relatif, yaitu membandingkan seseorang dengan orang lain di sekitarnya, khususnya orang yang lebih beruntung darinya.

Kemiskinan absolut diindikasikan dengan suatu tingkat kemiskinan di bawah kebutuhan hidup primer. Sedangkan kemiskinan relatif adalah suatu tingkat kemiskinan dalam hubungannya dengan rasio garis kemiskinan absolut atau distribusi pendapatan (kesejahteraan) yang timpang atau tidak merata (ADB, 1999: 26).

Menurut Sayogyo dalam Mulyanto Sumardi (1990: 21), kemiskinan absolut ditujukan kepada seseorang yang pendapatannya kurang dari 320 kg beras per tahun untuk tingkat luar kota dan 480 kg beras per tahun untuk kawasan dalam kota. Kalori yang dibutuhkan orang untuk hidup per hari adalah 1.821 kalori atau setara dengan sekitar 0,88 kg beras untuk kebutuhan makan saja. Cara yang lebih tepat untuk menentukan garis kemiskinan absolut adalah dengan menghitung batas Kebutuhan Hidup Minimal (KHM) untuk setiap rumah, seperti kebutuhan dasar (*basic needs*) berupa makanan, perumahan, kesehatan, pendidikan, pengangkutan, dan penyertaan masyarakat. Ukuran ini akan berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya sesuai dengan jenis kebutuhan dasar masing-masing (Mulyanto Sumardi, 1990: 22).

Versi lain dalam mendefinisikan kemiskinan absolut adalah dengan mengukur tingkat pendapatan minimal yang cukup untuk memenuhi Kebutuhan Fisik Minimal (KFM) terhadap makanan, pakaian dan perumahan untuk menjamin keberlangsungan hidup. Angka KFM ini berbeda dari satu negara ke negara lain, dari satu daerah ke daerah lainnya serta dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pernah menetapkan Garis Kemiskinan Internasional yaitu sebesar US \$ 125 per orang dalam satu tahun yang didasarkan pada harga konstan tahun 1980. Hal ini berarti bahwa seseorang yang konsumsinya kurang dari US\$ 125 per tahun dapat digolongkan miskin atau

berada dalam kemiskinan absolut (Michael P. Todaro, 1996: 31-32).

Kemiskinan relatif pula dapat dilihat dengan membandingkan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dengan jumlah penduduk secara keseluruhan. Untuk melihat tingkat kemiskinan relatif atau pemerataan kesejahteraan ekonomi perlu diketahui berdasarkan distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan sering diukur dengan membagi penduduk menjadi 5 atau 10 kelompok (*quintiles* atau *deciles*) sesuai dengan pendapatannya, kemudian menetapkan bagian yang diterima oleh masing-masing kelompok tersebut. Distribusi pendapatan juga dapat diukur dengan "Rasio Konsentrasi Gini" (*Gini Concentration Ratio*) atau lebih dikenal dengan sebutan „Koefisien Gini“. Koefisien Gini adalah ukuran ketidakseimbangan pendapatan, kesejahteraan agregat (keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketidaksempurnaan). Dalam prakteknya, koefisien gini di negara-negara yang mayoritas penduduknya mengalami ketimpangan kesejahteraan adalah berkisar antara 0,50 hingga 0,70. Sedangkan untuk negara-negara yang distribusi pendapatannya dikenal merata, koefisien gini berkisar antara 0,20 hingga 0,35 (Michael P. Todaro, 1996: 150-151).

Sementara itu, Kamal Salih (1984: 28) menjelaskan tiga ciri kemiskinan yang dapat membedakan antara golongan miskin dan bukan miskin

1. Keterancaman

Orang miskin mudah ditimpa malapetaka hidup yang tidak stabil. Hal ini disebabkan dari kesan inflasi yang sering terjadi, seperti harga hasil panen turun, banjir, penyakit dan diberhentikan dari kerja.

2. Pilihan yang terbatas

Golongan miskin umumnya tidak mempunyai pilihan hidup yang luas jika dibandingkan dengan golongan yang bukan miskin, seperti pilihan kerja, pelajaran anak-anak, kesenangan hidup dan makan minum.

3. Akses yang terbatas

Golongan miskin juga tertekan oleh kedudukan mereka yang melemahkan semangat juang diri sendiri karena tidak berkuasa, tidak mempunyai hak yang dapat digunakan untuk mengubah keadaan, seperti kepemilikan tanah atau harta benda lain termasuk pelajaran yang dapat memberikan kuasa kepada pemilik untuk mendapatkan berbagai macam manfaat dalam masyarakat dan ekonomi.

Dari beberapa ciri kemiskinan tersebut, ada 4 (empat) dimensi kemiskinan yang meliputi dimensi keuangan, dimensi kemampuan (*capability*), dimensi pengasingan sosial (*social exclusion*) dan dimensi keikutsertaan (*participatory*). Dari empat dimensi tersebut dapat diringkas menjadi dimensi pendapatan dan dimensi bukan pendapatan (United Nation, 2004: 29).

Indikator Pengukur Kemiskinan

Pada umumnya, pendapatan seseorang atau pendapatan rumah tangga digunakan sebagai petunjuk dalam mengukur kemiskinan. Hal ini karena kekurangan pendapatan dihitung sebagai faktor penyebab kemiskinan (Kamal Salih 1984: 29, Belfield et. Al 2015). Selain itu, kekurangan bukan pendapatan (*non-income*) juga dapat digunakan sebagai pengukur kemiskinan, seperti kurangnya persediaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan kekurangan sarana fisik lainnya (Abul Hasan M. Sadeq, 2002: 136).

Ada dua pendekatan dalam menggunakan pendapatan sebagai indikator pengukuran kemiskinan, yaitu cara mutlak dan cara relatif (Townsend, 1979). Cara mutlak diartikan sebagai satu standar minimal dalam taraf hidup seseorang atau sebuah keluarga yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Pendapatan yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan tersebut dihitung dan disebut sebagai garis kemiskinan. Seseorang atau

keluarga yang mempunyai jumlah pemasukan di bawah pendapatan yang diperlukan disebut

„miskin“. Sedangkan cara relatif diartikan sebagai usaha membandingkan kemiskinan dengan keadaan kedudukan tingkat hidup masyarakat secara keseluruhannya, yaitu dengan cara mengaitkan kemiskinan dengan distribusi pendapatan dalam masyarakat (Kamal Salih, 1984: 30).

Adapun cara pendekatan yang biasa digunakan dalam mengukur tingkat kemiskinan dari segi bukan makanan adalah dengan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*). Indeks Pembangunan Manusia mencakup tiga komponen dasar, yaitu harapan hidup, indeks tingkat pendidikan dan juga indeks kemampuan daya beli (*purchasing power parity*). Indeks harapan hidup berkaitan dengan rata-rata umur penduduk untuk bertahan hidup. Indeks tingkat pendidikan terdiri atas indeks rata-rata lama bersekolah dan indeks kemampuan mengenal huruf/membaca. Indeks rata-rata lama bersekolah dapat dihitung melalui komponen partisipasi sekolah, tingkatan atau kelas yang sedang/pernah dilalui, dan tingkat pendidikan tinggi yang ditamatkan. Angka pandai membaca adalah kemampuan membaca dan menulis bagi usia 15 tahun ke atas. Berdasarkan indikator ini akan dapat diketahui indeks pendidikan yang bisa menentukan kemajuan pendidikan suatu bangsa (Dadang S. Ansori, 2002).

Selain dari indeks tingkat pendidikan, ada juga indeks kesehatan yang terdiri dari indeks tingkat kesehatan gizi dan indeks kemampuan memenuhi kebutuhan konsumsi minimal.

Jamasy (2004) berpendapat bahwa indikator kemiskinan dapat dilihat dari 4 (empat) bentuk yang masing-masing bentuk memiliki arti yang berbeda. Keempat bentuk tersebut adalah kemiskinan mutlak, kemiskinan relatif, kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Tulisan Jamasy ini juga sesuai dengan tulisan-tulisan lain, seperti Gordon, D (2005), ataupun United Nations (1995 & 2004). Berikut adalah penjelasan masing-masing bentuk indikator kemiskinan menurut Jamasy (2004):

1. Kemiskinan mutlak, terjadi apabila tingkat pendapatan seseorang berada di bawah garis kemiskinan atau sejumlah pendapatan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimal, seperti kebutuhan makanan, pakaian, perumahan, kesehatan dan pendidikan yang diperlukan untuk mendukung hidup dan kemampuan bekerja. Kemiskinan mutlak ini berpedomankan standar yang berkesinambungan, tidak dipengaruhi oleh waktu dan tempat dalam satu negara. Perumpamaan indikator kemiskinan mutlak dalam suatu negara adalah persentase jumlah penduduk yang makan di bawah kategori yang mencukupi untuk kebutuhan dasar tubuh manusia sebanyak 2000-2500 kalori per hari untuk laki-laki dewasa.
2. Kemiskinan relatif, terjadi apabila pendapatan seseorang berada di atas garis kemiskinan, namun relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan pendapatan masyarakat sekitarnya.
3. Kemiskinan struktural, yaitu keadaan miskin yang disebabkan oleh pengaruh aturan atau undang-undang pembangunan yang belum menjangkau keseluruhan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan. Kemiskinan struktural muncul karena ketidakmampuan sistem dan struktur sosial dalam menyediakan peluang pekerjaan. Struktur sosial tidak mampu mengaitkan antara masyarakat dengan berbagai sumber yang ada baik sumber daya alam maupun sumber yang berasal dari pemerintah atau yang lainnya. Mereka yang tergolong dalam kelompok ini adalah petani, penambang pasir dan mereka yang tidak berpendidikan dan terlatih. Pihak yang paling berperan terjadinya kemiskinan struktural adalah pemerintah. Hal ini dikarenakan pemerintah mempunyai kekuasaan dan aturan untuk menentukan dan

mengubah masyarakat miskin menjadi tidak miskin.

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang timbul dari adanya struktur korelasi yang timpang, akibat dari kekurangan hubungan yang bersimetri yang meletakkan manusia sebagai objek. Struktur kemiskinan timbul karena adanya hegemoni dan pemerintah atau orang-orang yang berkuasa, dan orang-orang yang akan dipinggirkan lebih termajinalkan. Namun dalam beberapa dasawarsa kebelakangan ini, terjadi kecenderungan fenomena yang terbalik. Beberapa negara berkembang yang penduduknya mengalami kemiskinan struktural, mampu bangkit dan berkembang merebut pasar global (Saifur Rohman, 2011).

4. Kemiskinan kultural (budaya), yaitu kemiskinan yang berpedoman pada sikap orang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor-faktor budaya. Sikap tersebut diantaranya tidak mahu mencoba untuk memperbaiki tingkat kehidupan, malas, spender, dan tidak kreatif, walaupun terdapat cobaan dari pihak-pihak luar untuk membantu. Budaya kemiskinan timbul sebagai akibat dari nilai-nilai budaya orang miskin, seperti malas, mudah tunduk kepada nasib, dan kekurangan etika kerja. Ciri-ciri budaya kemiskinan ini adalah sebuah komunitas yang ragu-ragu mengintegrasikan dirinya di institusi-institusi utama, sikap tidak peduli dan curiga terdiskriminasi oleh masyarakat secara meluas. Para sarjana mengkritik mereka yang miskin ini karena kemiskinan mempunyai keprihatinan tentang masa depan dan lebih cenderung kepada "*live for the moment*". Perspektif "*blame the poor*" ini adalah stereotipik dan bukan dapat diaplikasikan kepada semua "*underclass*".

Sayogyo dalam Syahrizal (2006:8), mengklasifikasi tingkat kemiskinan

berdasarkan besaran pengeluaran per kapita setiap tahun yang diukur berdasarkan nilai yang setara dengan beras lokal. Di kawasan luar kota, kriteria kemiskinan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Paling miskin atau melarat, yaitu apabila pengeluaran per kapita setiap tahunnya sebesar 180 kg.
2. Miskin sekali, yaitu jika pengeluaran per kapita setiap tahunnya sebesar 180 kg beras hingga 240 kg beras.
3. Miskin, yaitu apabila pengeluaran per kapita setiap tahun 240 kg beras hingga 320 kg beras.
4. Hampir miskin, yakni apabila pengeluaran per kapita pada setiap tahun sebesar 320 kg hingga 480 kg beras.
5. Tidak miskin, yaitu jika pengeluaran lebih besar dari 480 kg beras per kapita setiap tahunnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan indikator pendekatan garis kemiskinan berdasarkan standar kecukupan kalori per kapita dalam satu hari, yaitu sebesar 2.100 kalori. BPS menggunakan dua garis kemiskinan, yaitu:

1. Sangat miskin, yakni jika seluruh pendapatan hanya bisa memenuhi keperluan 2.100 kalori.
2. Miskin, yakni apabila pendapatan baik yang dapat memenuhi kebutuhan kalorinya ataupun dapat memenuhi kebutuhan minimal untuk kesehatan, pendidikan, perumahan, pakaian dan kebutuhan minimal lainnya.

Chamhuri Siwar dalam Mohamad Khairudin Mohamad dan Ahmad Syahir Sarani (2004: 6), menjelaskan bahwa kemiskinan dapat diukur melalui Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) yang mewakili maksud-maksud dasar, seperti berbelanja untuk tujuan makanan dan minuman, pakaian, sewa rumah, pengangkutan, pendidikan, kesehatan dan rekreasi. Lebih lanjut Chamhuri Siwar menjelaskan bahwa Bank Dunia menetapkan ukuran golongan miskin, yaitu mereka yang berpendapatan US\$ 2 per kapita

dalam satu hari. Pendekatan garis kemiskinan (*poverty line*) atau *poverty limit* atau *poverty threshold* ini cukup populer dan hal itu juga digunakan oleh Bank Dunia yang merevisinya dari waktu ke waktu.

Satu lagi indikator untuk melihat kemiskinan ialah dari pandangan budaya golongan miskin, yaitu kesan kemiskinan yang menghinggap struktur masyarakat dalam waktu yang relatif lama. Hal ini menjadikan berkurangnya keinginan masyarakat untuk mengembangkan diri dan mengatakan bahwa apa yang terjadi pada mereka adalah takdir. Dalam konteks doktrin agama disebut dengan „jabariah“. Kemiskinan seseorang itu telah ditentukan secara azali (sebelum lahir). Islam seolah-olah tidak menghormati „*free will*“ dan kebebasan (*hurriya*) berdasarkan *qadha* dan *qadar* Tuhan (*divine will*) (Syamsiah Badruddin, 2009).

dari keluarga yang miskin dan tidak mendapat kesempatan yang sama untuk mendapatkan

Sebab-Sebab Kemiskinan

Segala bentuk skim yang dibuat untuk mengatasi masalah kemiskinan selalu melihat kepada sebab-sebab kemiskinan dalam suatu wilayah/daerah. Hal ini karena objektif dari mengetahui sebab kemiskinan adalah hal mendasar untuk mencapai keberhasilan skim tersebut. Dalam sistem ekonomi ada dua sebab utama terjadinya kemiskinan; yaitu sebab makro dan sebab mikro.

Sebab makro kemiskinan meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang rendah dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Sebuah negara dapat dikatakan miskin karena pendapatan per kapita negara bersangkutan yang rendah, hal ini disebabkan PDRB negara tersebut rendah. Demikian juga dengan penduduk menjadi miskin karena distribusi pendapatan yang tidak merata, hal tersebut karena sumber pendapatan terfokus pada beberapa orang saja sehingga mengakibatkan kemiskinan bagi yang lainnya (Abul Hasan M. Sadeq, 2007: 115).

Adapun sebab mikro kemiskinan mencakup banyak hal, seperti seseorang dikatakan miskin karena menganggur dan cacat. Atau dia miskin hanya karena dilahirkan

pendidikan dan latihan, akses kepada pekerjaan yang layak serta akses terhadap sarana dan prasarana yang berkelayakan.

Hal serupa dalam masalah sebab-sebab kemiskinan juga diungkapkan oleh sarjana Muslim yang membagikan kemiskinan menjadi miskin kebendaan dan miskin kerohanian. Hal ini tidak hanya memandang kemiskinan karena kekurangan pendapatan, namun kemiskinan juga diartikan sebagai kekurangan bukan pendapatan yang meliputi kekurangan ilmu pengetahuan, ketakwaan dan keimanan yang dapat menyebabkan miskin jiwa. Iman dan takwa yang kuat yang dihasilkan dari ilmu pengetahuan dapat menyebabkan seseorang kaya jiwa, sedangkan iman dan takwa yang rendah mengakibatkan miskin jiwa (M. Syukri Salleh, 1994).

Selain dari itu, dilihat dari faktor penyebabnya, kemiskinan dibedakan menjadi 2 bagian:

1. Kemiskinan alami, yaitu kemiskinan yang terjadi akibat dari fisik seseorang dan lingkungan sebagai objek, sehingga orang tersebut kesulitan dalam melaksanakan aktivitas atau pekerjaan. Dilihat dari perorangan, kemiskinan bisa terjadi karena kemalasan, kekurangan *skill*/keahlian, kekurangan intelektual, kelemahan fisik dan tidak adanya kesungguhan untuk mencapai keberhasilan. Kemudian, kemiskinan juga bisa terjadi disebabkan oleh golongan miskin dengan rendah diri menerima kemiskinan, karena mereka tidak dapat keluar dari kemiskinan yang telah membudaya.
2. Kemiskinan struktural sebagai bagian relatif, dimana ada sekumpulan masyarakat yang miskin, sedangkan kumpulan yang lainnya tidak miskin. Sistem sosial ekonomi yang diterapkan memungkinkan terfokusnya kekuasaan dan sumber daya pada pihak tertentu, yang menghambat peluang bagi pihak lain. Hal ini menyebabkan banyak orang miskin yang tidak bisa menggunakan akses dan sarana

ekonomi serta sarana lainnya yang sebetulnya disediakan untuk mereka.

Adapun dilihat dari pola waktu, kemiskinan dibagi menjadi :

1. Kemiskinan yang berkelanjutan (*persistent poverty*), yaitu kemiskinan yang kronik atau keturunan. Keadaan ini biasanya terjadi di kawasan terpencil yang sumber daya alamnya

sangat terbatas.

2. Kemiskinan siklikal (*cyclical poverty*), yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan.
3. Kemiskinan yang bermusim (*seasonal poverty*), yaitu kemiskinan yang sering dijumpai pada kasus nelayan dan petani tanaman pangan disebabkan

faktor cuaca yang berubah-ubah.

4. Kemiskinan sesaat atau sementara

(*accidental poverty*), yaitu kemiskinan

yang terjadi karena bencana alam atau sebagai sebuah agama yang menekankan kepada keseimbangan, menyebabkan berkurangnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

Teori Pemberantasan Kemiskinan

Mengetahui penyebab kemiskinan merupakan langkah awal untuk menentukan setiap skim yang bertujuan agar kemiskinan dapat dikurangi. Hal ini dilakukan supaya peraturan yang dibuat untuk mengurangi kemiskinan tidak melenceng jauh dari tujuan yang diharapkan. Pada bagian penjelasan sebelum ini telah disebutkan tentang faktor-faktor penyebab kemiskinan baik dari sistem ekonomi makro maupun mikro.

Pada bagian ini, akan dijelaskan berbagai cara mengatasi masalah kemiskinan baik berdasarkan perspektif Islam maupun perspektif konvensional.

1. Perspektif Islam

memperbaiki kehidupan keduniaannya. Syariah (Alquran dan Sunnah) mengajarkan kepada umat Islam bagaimana cara menangani masalah kemiskinan.

Ayat Alquran memberi bayangan bahwa Allah SWT menyediakan rezeki yang cukup untuk hamba-hambaNya. Di antara ayat tersebut adalah sebagai berikut:

وَمَا كُنَّا بِكُمْ لِرَبِّ آلِكُمْ
 مَوْلَىٰ ذِي ضَرْحٍ مَّا ظَنُّوا
 شَيْءًا نَزَّلْنَا بِالْحَقِّ
 مِرْيَٰتًا مِّنْ رَّبِّكُمْ
 وَمَا كُنَّا بِكُمْ لِرَبِّ آلِكُمْ
 مَوْلَىٰ ذِي ضَرْحٍ مَّا ظَنُّوا

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur” (QS. 7: 10).

Lalu firman Allah:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ النَّاسِ إِذْ أَنزَلَ فِيهِ سُبْحَانَ اللَّهِ
 وَأَنزَلَ فِيهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَأَنزَلَ فِيهِ سُبْحَانَ اللَّهِ

(*balance/tawazun*), Islam memberikan penekanan kepada kedua aspek baik dunia maupun akhirat. Dalam Islam, seseorang boleh memperbaiki hal-hal kerohanian dengan cara

Artinya: “*Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung*” (QS. 62: 10).

Beberapa pemikir muslim berpendapat bahwa kemiskinan dapat diatasi dengan berbagai cara sesuai dengan penyebabnya. Muhammad Ridwan (2014) berpendapat bahwa kemiskinan dapat diatasi dengan berpedoman kepada ajaran Alquran. Diantara langkah yang harus dilakukan adalah bekerja dan berusaha, hidup hemat dan tidak berlebihan, sadar untuk bersedekah dan mengeluarkan zakat.

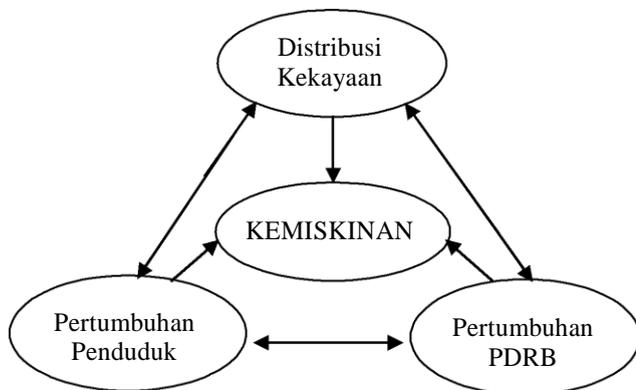
Yusuf al-Qardhawi (2009), menjelaskan bahwa dimensi Islam yang dapat membebaskan umatnya dari kemiskinan adalah zakat. Sekarang ini, zakat bukan sekedar dikenal dengan bentuk zaman klasik, tetapi zakat telah meluas, seperti zakat investasi dan zakat profesi. Apabila umat Islam yang mempunyai harta berlebih sadar untuk mengeluarkan zakatnya, maka tingkat kemiskinan di Indonesia pasti dapat dikurangi.

Dalam tingkatan makro berdasarkan perspektif Islam, kemiskinan dapat diatasi dengan menggalakkan pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan yang merata.

Adapun dari tingkat ekonomi mikro dapat diatasi dengan menyediakan peluang pekerjaan. Sedangkan dari segi keimanan dan ketakwaan dapat diatasi dengan meningkatkan pembangunan sumber daya manusia.

Peraturan perundang-undangan pengurangan kemiskinan harus dipandang dalam konteks hubungan yang dinamik antara proses pertumbuhan ekonomi dan nilai-nilai progresif. Hal ini seperti yang tergambar dalam dinamika pengurangan kemiskinan pada gambar 1 di bawah ini.

Gambar 1 :
Dinamika Pengurangan Kemiskinan



Sumber: Analisa Pengkaji dari Berbagai Sumber

Gambar 1 di atas menegaskan apabila distribusi pendapatan berjalan sama rata sesuai dengan pertumbuhan PDRB dan pertumbuhan penduduk, maka secara otomatis tingkat kemiskinan berkurang. Beberapa faktor yang berpengaruh dalam mengurangi kemiskinan dalam perspektif Islam adalah sebagai berikut:

a. *Pertumbuhan Ekonomi*

Terdapat hubungan positif antara PDRB dengan insiden kemiskinan. Hal ini dapat dilihat pada negara-negara yang bisa mengurangi angka kemiskinan dengan dukungan tingkat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang tinggi. Tentu saja kemiskinan selalu ada dalam semua negara yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan juga negara-negara industri. Namun tingkat kemiskinan tersebut begitu rendah dan

Islam menawarkan sebuah sistem yang dapat memungkinkan untuk menambah pendapatan, yaitu dengan menyediakan peluang pekerjaan yang bermoral dan menganjurkan untuk bekerja dengan giat. Islam juga mengajarkan etika perilaku konsumen yang rendah hati. Sikap tersebut dapat menghasilkan tabungan yang bisa digunakan untuk modal investasi yang efisien yang dipercayai dapat mendorong ke arah pembentukan modal dan pertumbuhan ekonomi (Abul Hasan M. Sadeq, 2007).

Secara alami, strategi pertumbuhan merupakan proses jangka panjang. Agar proses tersebut berhasil, strategi pertumbuhan harus dipusatkan pada penambahan dan mempertinggi faktor penentu pertumbuhan ekonomi yang ada. Faktor yang dimaksud meliputi pendidikan yang berkualitas, kesehatan dan faktor penentu kemampuan manusia yang lain, investasi yang menjanjikan, perilaku pasar yang efektif dan efisien, serta pembangunan yang demokratis dan praktis disertai peranan peraturan perundang-undangan.

Komponen pengurangan kemiskinan selalu diikuti dengan adanya pendapatan yang tinggi (Ismail Sirageldin, 2000).

diletakkan di dalam kerangka ini untuk mendapatkan aturan berdasarkan faham persamaan dalam pengembangan kemampuan manusia dan pembagian akses. Hal ini merupakan bagian dari strategi pertumbuhan yang sangat penting yang bisa mendukung pengurangan angka kemiskinan. Investasi yang sesuai dalam bidang pendidikan dan menjamin kualitasnya terutama pada pendidikan tingkat dasar akan memberikan kesan positif dalam memberantas kemiskinan (Ismail Sirageldin, 2000).

b. Distribusi Kekayaan

Islam mengakui pemilihan dan juga kebebasan seseorang untuk mencari rezeki. Islam tidak mendukung distribusi pendapatan atau kekayaan pada perorangan dalam masyarakat secara sama. Hal ini karena Islam mengenal adanya perbedaan antara manusia baik dari segi kemampuan, efisiensi dan kecerdasan yang bisa menciptakan suatu lingkungan persaingan yang sehat di dalam usaha dan pekerjaan. Islam mengharapkan

dengan adanya ketidaksamaan ekonomi antara sesama insan dapat meningkatkan pembangunan sumber daya manusia dan kemajuan masyarakat (Nasseri Taib, 1990: 80).

Namun perlu diingat bahwa walaupun Islam mengakui adanya ketidaksamaan distribusi pendapatan, akan tetapi Islam tidak mengizinkan adanya jurang pemisah antara orang yang kaya dan yang miskin sampai batas yang dapat merusak keharmonisan masyarakat. Oleh karena itu, ajaran Islam selalu mengurangi jurang pemisah antara kedua golongan tersebut, yaitu dengan mewajibkan kepada orang kaya untuk mengeluarkan sebagian hartanya dan diberikan kepada fakir dan miskin. Diantara konsep distribusi pendapatan dalam Islam tersebut adalah zakat, infak, sedekah dan wakaf.

Dari sistem pendistribusian berdasarkan perspektif Islam ini, diharapkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin dapat dikurangi sehingga terbentuk masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Selain daripada itu, sistem tersebut juga berfungsi sebagai jaminan sosial untuk orang yang cacat atau telah uzur yang ada dalam masyarakat sehingga kehidupan mereka dapat terjamin.

c. Peluang Pekerjaan

Islam tidak hanya membebankan tanggungjawab mengatasi kemiskinan pada pihak pemerintah dan orang kaya saja, namun Islam senantiasa memberikan dukungan kepada setiap orang untuk memerangi kemiskinan yang terjadi pada dirinya sendiri, yaitu dengan bekerja. Hal ini karena bekerja merupakan usaha yang paling mendasar untuk memberantas kemiskinan yang ada pada sebuah keluarga. Dengan bekerja, seseorang akan mendapatkan gaji yang bisa digunakan untuk memenuhi kehidupan diri dan keluarganya (Al-Qardhawi, 1997: 39).

Islam telah menganjurkan untuk mencari rezeki di muka bumi ini dengan cara yang halal. Setiap pekerjaan yang baik dan

dan termasuk dalam ibadah kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Selain menunaikan syariat Islam, pekerjaan tersebut juga bisa memberikan sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Segala usaha yang mulia diberkahi oleh Allah dan menjadi ibadah dalam Islam. Dengan pengertian lain, pekerjaan yang halal yang disertai dengan niat karena Allah adalah merupakan ibadah yang mempunyai nilai kerohanian. Selain itu, usaha yang halal juga menghasilkan kebaikan di dunia melalui nilai-nilai sosial ekonomi dan selanjutnya menghasilkan kebaikan di akhirat lantaran nilai kerohanian yang kekal abadi. Oleh sebab itu, pihak pemerintah seharusnya selalu menyediakan peluang pekerjaan untuk penduduk sehingga kemiskinan dapat dikurangi (Al-Qardhawi, 1997: 54).

halal, seperti bertani, berdagang dan lain sebagainya merupakan kegiatan keagamaan

d. Islam dan Keadilan

Persoalan keadilan sangatlah penting dalam Islam. Sistem ekonomi Islam sangat menekankan bagaimana sistem ekonomi yang adil akan mampu mengatasi masalah kemiskinan. Chopra (1985) menekankan penghapusan kemiskinan (*eradication of poverty*), keadilan sosial ekonomi dan distribusi pendapatan yang adil (*equitable*) sebagai ciri yang tidak bisa ditunda dalam sistem ekonomi Islam. Kategori mewujudkan keadilan adalah salah satu tujuan utama Islam, dan oleh karena itu sistem ekonomi Islam berusaha keras menghapuskan “*all forms of inequity, injustice, exploitation, oppression and wrong-doing*” (Chopra, 1992: 209).

2. Teori Sosiologi Konvensional

Selain dari empat cara memberantas kemiskinan berdasarkan perspektif Islam, ada juga teori sosiologi konvensional yang bisa dikemukakan oleh para sarjana dalam memahami kemiskinan dan upaya untuk menghapus kemiskinan. Teori-teori ini walaupun tersendiri tetapi ada kalanya tumpang tindih, kadang kala sesuai dan terkadang pula tidak sesuai (*contradictory*). Di antara teori-teori itu adalah:

- a. Teori neo liberal

- b. Teori sosial demokratis
- c. Teori marjinal/*culture of poverty*
- d. Teori bercirikan pembangunan
- e. Teori struktural/ketertanggung
- f. Teori ekonomi politik

Pendekatan neo liberal cukup populer di Amerika Latin. Pelaksanaannya dimulai awal tahun 1980an karena hutang ekonomi (*economic debt*) yang terbebani akibat dari pelaksanaan model ekonomi *import substitution industrialization* (ISI). Di bawah ISI ini, negara Amerika Latin berusaha mempromosikan dan mengembangkan industri-industri domestik dengan mengenakan tarif atau kuota untuk menjaganya (*protect*) dari impor. Namun Amerika Latin terpaksa impor barangan modal (*capital goods*) untuk memperbaiki (*upgrade*) industri-industri ini. Tetapi malangnya harga yang melambung tinggi (*steep prices*) dari impor ini telah menyebabkan terjadinya peminjaman dan hutang yang tinggi. Sebagai jalan keluar dari hutang yang besar, agen-agen keuangan antar bangsa telah menjanjikan bantuan ekonomi secara besar-besaran dengan syarat mereka melaksanakan “neo liberal reforms”. Namun demikian reformasi yang diperkenalkan ini gagal untuk menghasilkan harapan ekonomi yang tinggi dari kalangan pemberi (agen-agen bersangkutan) dan juga penerima (negara Amerika Latin).

Pendekatan sosial demokratik pula menyatakan bahwa masyarakat kapitalis sangat memerlukan satu keadaan yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat (*welfare state*). Hal ini karena sistem kapitalis adalah merugikan (*wasteful*) dan tidak efisien karena tidak memperdulikan tentang keadaan orang miskin, warga tua dan orang yang tidak mampu. Pendekatan sosial demokratik berpendapat bahwa golongan orang berada atau kaya harus membantu dan menolong orang yang lemah. Pendekatan ini dianggap penting karena negara tersebut akan mampu mengatur (*regulate*) kesan-kesan yang tidak baik dari sistem kapitalis seperti upah yang rendah (*low wages*) dan pengangguran.

kemiskinan yang terpusat di kalangan masyarakat tertentu. Oscar Lewis (1966) adalah tokoh aliran teori marjinal yang mengedepankan konsep *Culture of Poverty*. Menurut Lewis, masyarakat di dunia menjadi miskin karena adanya budaya kemiskinan yang mempunyai karakter apatis, yaitu

Adapun teori marjinal beranggapan bahwa kemiskinan kota terjadi akibat budaya

berserah diri hanya kepada nasib. Selain itu, kemiskinan dalam teori ini juga terjadi akibat sistem kekeluargaan yang tidak kokoh, kurangnya pendidikan, tidak adanya keinginan membina masa depan yang baik, banyaknya tindak kriminal dan kekerasan yang sering terjadi.

Teori bercorak pembangunan pula muncul dari teori-teori pembangunan terutama teori neo-liberal. Teori ini mencari akar masalah kemiskinan dari permasalahan ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan. Adam Smith (1776) dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* menjelaskan bahwa kekuasaan berada di tangan para perusahaan dagang raksasa, misalnya *the East India Company*. Untuk menjaga kepentingan mereka, diberlakukan gerakan proteksionisme sehingga praktek kompetisi menjadi sangat terbatas. Proteksionisme ini berupa penetapan tarif yang tinggi untuk barang impor. Hal ini kemudian membuat harga barang produktivitas dalam negeri menjadi lebih murah.

Teori struktural beranggapan bahwa kemiskinan di dunia mesti dilihat dari ekonomi dunia dan struktur politik global yang menjadi penyebab negara bersangkutan menjadi „terbelakang“ dan masyarakatnya menjadi miskin. Teori ini merupakan teori yang sangat populer dan banyak sarjana-sarjana yang membicarakannya khususnya sarjana yang berorientasi pada Marxisme yang membicarakan tentang imperialisme. Di antara sarjana-sarjana yang terkenal yang membicarakan teori struktural dengan panjang lebar ialah Paul Baran, Mathias Vernengo, Furtado, Samir Amin, Paul Sweszy, Walter Rodney dan Andre Gunder Frank sendiri. (Andre Gunder Frank, 1967)

Terakhir dalam teori ekonomi konvensional adalah teori ekonomi politik.

Teori ini mempunyai akar umbinya dari tulisan klasik Karl Marx dan Engels (1962) yang memperoleh pendirian intelektualnya dari tokoh-tokoh ekonomi terkenal, seperti Smith (1937), Pye (1966) dan Mill (1970). Teori ekonomi politik mempunyai keprihatinan tentang kekayaan sosial, hubungan kelas dan konflik, serta kesan-kesan perkembangan masyarakat dari satu tingkat ke tingkat yang lain. Pendekatan ekonomi politik juga mencoba menerangkan hubungan sosial yang ada di kalangan anggota masyarakat dalam semua proses pengeluaran, pertukaran dan penggunaan barang & layanan (*goods and services*).

purata adalah 2 meter di atas permukaan laut dan mempunyai pantai sepanjang 134 km.

F. DESKRIPSI KOTA DUMAI

Letak Geografi

Secara geografi, Kota Dumai berada pada posisi antara 101°23'37" - 101°8'13" Bujur Timur dan 1°23'23" - 1°24'23" Lintang Utara, dengan luas wilayah 1.727,38 km² yang berdekatan dengan wilayah-wilayah seperti:

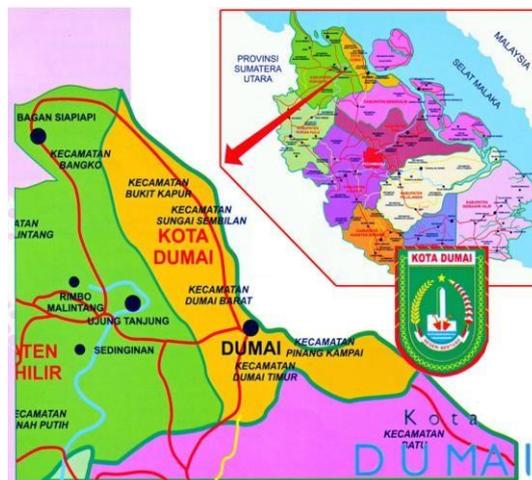
1. Sebelah Utara berdekatan dengan Selat Rupat.
2. Sebelah Timur berdekatan dengan Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis.
3. Sebelah Selatan berdekatan dengan Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.
4. Sebelah Barat berdekatan dengan Kecamatan Tanah Putih dan Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir.

Sebagian Kota Dumai terdiri dari dataran rendah di bagian Utara dan sebagiannya lagi dataran tinggi sebelah Selatan. Umumnya, struktur tanah terdiri meliputi tanah *podsolik* merah kuning yang terbuat dari batuan endapan dan *alluvial* serta tanah *organosol* dan *gley* humus dalam bentuk paya atau tanah lembap. Dilihat secara topografi, Kota Dumai berada pada lahan bergambut sedalam 0 – 0.5 m dan ketinggian

Kota Dumai sangat dipengaruhi oleh iklim laut dengan kecepatan angin yang berembus rata-rata 6 – 7 knot per jam dan curah hujan sebanyak 75 hingga 130 hari hujan per tahunnya. Musim hujan terjadi pada bulan September hingga bulan Februari. Sedangkan musim kering atau kemarau terjadi pada bulan Maret hingga bulan Agustus. Iklim Kota Dumai secara umum adalah tropis dengan suhu udara antara 25° Celcius hingga 32° Celcius, dengan tingkat kelembapan antara 82 – 84 persen.

Kota Dumai mempunyai 16 buah sungai yang dapat dilayari oleh kapal pompong, sampan, dan perahu dengan panjang sungai keseluruhannya sekitar 222 km. Sungai ini bermuara di pantai Timur Kota Dumai atau di Selat Rupa dan Selat Malaka sebagai jalur lalu lintas perdagangan. Sungai Buluala, Sungai Masjid dan Sungai Senepis merupakan sungai yang paling panjang. Untuk mengetahui secara lebih terperinci mengenai keadaan Kota Dumai dapat dilihat dalam Gambar 2 di bawah ini.

Gambar 2: Peta Kota Dumai



Keadaan Demografi

Jumlah penduduk Kota Dumai pada 31 Desember 2013 adalah sebanyak 280,067 orang yang terdiri dari 134,983 orang laki-laki dan 145,084 orang perempuan dengan jumlah kepala rumah tangga sebanyak 70,003 orang. Kepadatan penduduk yang terbesar di pusat Kota Dumai adalah sebanyak 3,240 orang, Dumai Timur sebanyak 1,237 orang dan yang

paling rendah adalah di Medang Kampai dengan total penduduk sebanyak 21 orang dan penduduk Kecamatan Sungai Sembilan 31 orang. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk

di Kota Dumai tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1:
Jumlah Penduduk Kecamatan Kota Dumai Tahun 2013

No	Kecamatan	Kepala Rumah Tangga	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Bukit Kapur	11.132	23.159	20.872	44.031
2.	Medang Kampai	2.975	6.038	5.317	11.355
3.	Sungai Sembilan	7.685	16.364	14.708	31.072
4.	Dumai Barat	10.040	20.758	19.561	40.319
5.	Dumai Timur	15.100	31.398	29.242	60.640
6.	Dumai Kota	10.547	21.620	20.736	42.356
7.	Dumai Selatan	12.524	25.747	24.547	50.294
	Total	70.003	145.084	134.983	280.067

Sumber : Dumai Dalam Angka 2013

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang paling banyak adalah yang berdomisili di Kecamatan Dumai Timur yaitu 60.640 jiwa (21,65%) diikuti Kecamatan Dumai Selatan sebanyak 50.924 jiwa (17,96%), Kecamatan Bukit Kapur sebanyak 44.031 jiwa (15,72%), Kecamatan Dumai Kota sebanyak 42.356 jiwa (15,12 %), Kecamatan Dumai Barat sebanyak 40.319 jiwa (14,40%), Kecamatan Sungai Sembilan sebanyak 31.072 jiwa (11,09%) dan penduduk yang paling sedikit jumlahnya adalah di Kecamatan Medang Kampai sebanyak 11.355 jiwa (4,05%). Sedangkan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang paling banyak di Kecamatan Dumai Timur yaitu 31.098 jiwa (21,64%) dan 29.242 (21,66%) serta yang paling sedikit adalah di Kecamatan Medang Kampai yaitu sebanyak 6.038 jiwa (4,16%).

Sejarah Perkembangan Kota Dumai

Dumai adalah sebuah dusun kecil di pesisir timur Propinsi Riau di pantai Timur Sumatera, Indonesia. Dumai adalah sebuah perkampungan nelayan yang fasilitasnya sangat terbatas, sehingga para nelayan tidak dapat melakukan banyak aktivitas, ditambah penduduknya yang sulit untuk keluar kota.

Kesemua itu adalah karena keadaan persekitaran yang kumuh, jalanan yang rusak, lampu listrik yang sangat sedikit dan juga persediaan air bersih yang terbatas.

Dalam waktu yang lama, Dumai berkembang menjadi sebuah kota kecil dan selanjutnya menjadi kota administratif selama dua puluh tiga tahun. Hal ini menjadi perhatian penduduk dari luar kota untuk datang dan bekerja di Dumai. Kota Dumai yang berdekatan dengan Selat Melaka, merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Filosofi dasar dari peningkatan status pengelolaan wilayah pemerintahan ialah untuk memperpendek rentang kendali (*Spane of Controle*) dan mempercepat tingkat pelayanan serta memperbesar keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan memanfaatkan peluang pengembangan dari potensi ekonomi. Kota Dumai dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 16 tahun 1999 pada 20 April 1999 tentang Pembentukan Kotamadya daerah Tingkat II Dumai.

Pada awal pembentukan wilayah pemerintahan, Kota Dumai memiliki tiga wilayah Kecamatan, tiga belas Perkampungan dan sembilan Desa serta mempunyai

penduduk sebanyak 15.699 jiwa dengan tingkat kepadatan 8.385 jiwa per-km². Kemudian Kota Dumai berkembang menjadi lima Kecamatan dan tiga puluh dua Perkampungan. Dalam melaksanakan roda pemerintahannya sebagai pengemban amanah undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta dalam pemberian layanan kepada publik untuk memperpendek kendali dan membuka kawasan baru, Kota Dumai saat ini telah memiliki 7 (tujuh) Kecamatan dan 33 (tiga puluh tiga) Perkampungan. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 dan Nomor 26 Tahun 2005 dibentuk Satuan Organisasi dan Tata laksana (SOT) baru dan telah pula dilantik pimpinan. Dalam Perda tersebut dijelaskan satu Sekretariat Daerah, satu Sekretariat DPRD, sepuluh Dinas Daerah, empat Badan, dan tiga Kantor sebagai Lembaga Teknis Daerah.

Untuk memberikan arah, dukungan, penyatu gerak bagi seluruh *stakeholder* dalam mewujudkan keadaan masa depan yang diinginkan dan sesuai dengan rumusan yang telah ditetapkan, Kota Dumai membuat visi dan misi kota. Visi Kota Dumai yaitu "Mewujudkan kota pelabuhan perdagangan, pariwisata dan industri bersih, sehat, rukun dan indah di kawasan Pantai Timur Sumatera yang berbudaya Melayu dan Islami tahun 2015.

Perekonomian Kota Dumai

Pertumbuhan ekonomi Kota Dumai tanpa Minyak dan Gas Bumi selama lima tahun - 2008 hingga 2012 - adalah relatif tinggi yaitu di atas 8,30%. Tabel 2 menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi Kota Dumai tanpa migas tahun 2008-2012 dalam persen.

Tabel 2:
Pertumbuhan Ekonomi Kota Dumai Tanpa Migas Tahun 2008-2012 (%)

Lapangan Usaha	2008	2009	2010 *	2011 **	2012 ***
1. Pertanian	4,06	3,97	3,57	2,83	2,94
2. Pertambangan & Penggalian	9,8	9,59	8,88	21,79	18,05
3. Industri Pengolahan	8,70	8,21	8,37	7,51	10,30
4. Listrik, Gas, Air Bersih	4,03	2,13	3,68	6,86	6,93
5. Bangunan	8,73	8,62	8,42	7,67	9,01
6. Perdagangan	10,15	9,53	9,58	9,01	8,76
7. Pengangkutan & telekomunikasi	8,52	8,35	8,82	9,12	8,90
PDRB	8,66	8,43	8,60	8,34	8,59

Keterangan :

*) angka perbaikan

**) angka sementara

***) angka sangat sementara

Sumber: Pendapatan Regional Dumai, 2014

1. Pendapatan Regional

Angka pendapatan regional ialah produksi yang dihasilkan oleh unit-unit ekonomi pada suatu daerah, hingga boleh digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur kemajuan ekonomi suatu daerah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB pada tahun 2008-2012 atas dasar harga berlaku mengikut lapangan usaha naik dari 7.906.906,29 juta rupiah tahun 2011 menjadi 9.331.382,74 juta rupiah pada tahun 2012. Demikian juga angka PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 berdasarkan lapangan usaha sebesar 1.771.906,27 juta rupiah pada tahun 2008 naik menjadi 2.454.778,89 juta rupiah pada tahun 2012.

Tabel 3:
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Dumai Tanpa Migas Atas Dasar Harga Berlaku Berdasarkan Lapangan Usaha (Dalam Rupiah) Tahun 2008-2012

No	Lapangan Usaha Industrial Origin	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Pertanian	295.636,19	336.819,28	390.367,80	434.367,42	484.844,11
2.	Pertambangan & Penggalian	20.270,63	24.206,75	28.720,97	37.441,40	47.598,11
3.	Industri dan Pengolahan	972.700,18	1.287.585,29	1.714.302,67	2.149.127,26	2.569.762,41
4.	Listrik, Gas & Air Minum	32.492,44	38.437,36	46.199,38	53.724,85	59.974,51
5.	Bangunan	825.974,14	875.532,59	952.523,73	1.107.799,15	1.331.188,59
6.	Perdagangan, Hotel & Restoran	1.025.881,86	1.340.519,58	1.749.009,62	2.157.948,76	2.528.940,50
7.	Pengangkutan & Komunikasi	577.172,96	681.365,19	808.979,57	950.482,59	1.122.722,78
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	128.346,55	156.486,47	209.109,24	264.837,79	321.073,64
9.	Jasa-Jasa	446.384,23	536.425,58	640.189,16	751.177,08	865.278,10
PDRB/GRDP		4.324.859,17	5.277.378,10	6.539.868,14	7.906.906,29	9.331.382,74

Sumber : Dumai Dalam Angka Tahun 2013

Tabel 4:
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Dumai Tanpa Migas Atas Dasar Harga Konstan 2000 Berdasarkan Lapangan Usaha (Dalam Rupiah) Tahun 2008-2012

No	Lapangan Usaha Industrial Origin	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Pertanian	135.952,66	141.352,59	146.403,98	150.542,58	154.975,11
2.	Pertambangan dan Penggalian	10.167,85	11.142,95	12.132,90	14.776,40	17.443,55
3.	Industri dan Pengolahan	89.532,17	96.882,76	104.995,58	112.882,78	124.514,76
4.	Listrik, Gas & Air Minum	12.622,91	12.891,48	13.365,77	14.282,81	15.273,05
5.	Bangunan	307.820,14	334.354,24	362.499,67	390.289,15	425.440,23
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	508.306,87	556.766,48	610.088,17	665.056,56	723.324,78
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	379.885,31	411.801,98	447.914,74	488.746,73	532.236,31
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	38.183,59	40.588,17	43.953,97	48.312,20	53.088,25
9.	Jasa-Jasa	289.434,77	315.713,06	345.221,14	375.607,65	408.482,85
PDRB GRDP		1.771.906,27	1.921.293,70	2.086.575,92	2.260.496,97	2.454.778,89

Sumber : Regional Income Kota Dumai, 2013

Pendapatan Regional Perkapita

Guna mengetahui keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah, di samping PDRB perlu juga dilihat perkembangan PDRB perkapita. PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2008 sebesar 17.782.279,30 juta rupiah, naik jika dibandingkan dengan tahun 2007 yaitu sebesar 14.327.996,42 juta rupiah. Demikian pula atas dasar harga konstan sebesar 7.623.221,02 juta rupiah pada tahun 2008, naik jika dibandingkan dengan tahun 2007 sebesar 7.055.469,34 juta rupiah.

Kemudian pendapatan regional perkapita pada tahun 2008 berdasarkan harga berlaku sebesar 16.302.788,68 juta rupiah, naik jika dibandingkan dengan tahun 2007 sebesar 13.105.210,26 juta rupiah. Adapun pendapatan regional perkapita berdasarkan harga konstan pada tahun 2008 sebesar 6.948.498,83 juta rupiah, naik jika dibandingkan dengan tahun 2007 yaitu sebesar 6.437.936,95 juta rupiah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel 5 secara lebih terperinci, dari tahun 2004 hingga tahun 2008 di bawah ini.

Tabel 5:
PDRB Per Kapita Dan Pendapatan Regional Per Kapita (Dalam Rupiah) Tahun 2004 – 2008

No	ITEM (Tahun)	PDRB Per Kapita	Pendapatan Regional Per Kapita
I.	Atas Dasar Harga Berlaku:		
	2004	9.141.501,99	8.357.161,09
	2005	10.389.360,43	9.497.953,33
	2006*)	12.032.511,04	11.000.121,60
	2007**) (2008**)	14.327.996,42 (17.782.279,30)	13.105.210,26 (16.302.788,68)
II.	Atas Dasar Harga Konstan 2000:		
	2004	5.890.517,03	5.385.110,70

2005	6.244.862,62	6.709.053,39
2006*)	6.649.413,58	6.079.655,71
2007**)	7.055.469,34	6.437.939,95
2008**)	7.632.221,02	6.948.498,83

Catatan/Note : *) = Angka Perbaikan
 **) = Angka Sementara

Sumber: Regional Income Kota Dumai, 2013

b. Potensi Unggulan Daerah

Secara geografi, Kota Dumai terletak pada posisi yang strategis dan memiliki potensi unggulan, antara lain:

- 1) Kota Dumai berhadapan langsung dengan Selat Rupat dan Selat Melaka, berada pada jalur perhubungan laut yang ramai, hingga menjadi salah satu pelabuhan Samudera yang sangat potensial untuk kegiatan ekspor dan impor.
- 2) Kota Dumai terletak ditengah-tengah jalur penghubung darat yang menghubungkan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat serta penghubung untuk daerah Riau Daratan dan penghubung laut dengan negara tetangga Malaysia khususnya Melaka, Negeri Sembilan dan Singapura. Oleh karena itu, Kota Dumai dirancang menjadi pusat perdagangan serta menjadi Kawasan Perdagangan Bebas (*Free Trade Zone*).

Adapun keadaan pengangkutan Kota Dumai adalah sebagai berikut:

- 1) Pengangkutan Darat
 Untuk kelancaran pengangkutan darat yang mendukung intensitas arus barang dan orang yang cukup tinggi, maka Pemerintah Kota Dumai menyiapkan terminal penumpang di Jalan Kelakap Tujuh seluas tujuh ha dan terminal barang di Bukit Jin Jalan Perkampungan Bukit Datuk seluas enam ha.
- 2) Pengangkutan Laut
 Kota Dumai menyediakan pelabuhan, hal ini karena Kota Dumai yang menjadi gerbang daerah Timur Sumatera bukan hanya melayani tujuan domestik saja, tetapi melayani juga tujuan ke negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Adapun beberapa pelabuhan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a) Pelabuhan umum Pelindo Internasional dengan kedalaman 11 meter, bisa mengakomodasi kapal dengan ukuran (bobot) 20-30 ribu dwt dan bisa bongkar muat barang umum sebesar 5.6 juta ton tiap tahun dan cpo 4 juta ton tiap tahun serta 2.500 kapal setiap tahunnya.

- b) Pelabuhan caltex/chevron untuk mengangkut minyak mentah dan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan ukuran bobot kapal 60-70 dwt dan kedalaman 16 meter.
- c) Pelabuhan Pertamina untuk mengangkut minyak mentah dan BBM dengan ukuran bobot kapal 60 dwt dan kedalaman pelabuhan 16 meter. Dari kedua pelabuhan tersebut, sebanyak 4.847 kapal keluar masuk setiap tahunnya.
- d) Pelabuhan kawasan industri Dumai yang mengangkut minyak nabati dan pupuk NPK dengan bobot kapal 50 dwt dan kedalaman 14 meter.

- 3) Pengangkutan Udara
 Kota Dumai mempunyai bandara yang bernama Pinang Kampai. Bandara tersebut diperuntukkan untuk pesawat Fokker 28 dan Fokker 100. Panjang landasan adalah 1.800 meter dan lebar 30 meter serta dikembangkan menjadi panjang 2.250 meter dan lebar 45 meter. Layanan pengangkutan udara ini dikelola oleh PT. Pelita Air Service untuk rute pergi balik antara Dumai-Jakarta.

Potensi lainnya yang dimiliki oleh Kota Dumai antara lain:

- 1) Kawasan Industri
 Kota Dumai mempunyai lima kawasan industri, satu dermaga ekspor dengan tiga kapal tanker standar dan beberapa dermaga ukuran lebih kecil. Kawasan ini memproduksi pupuk NPK yang besar.
- 2) Kota Dumai mempunyai sarana penunjang perdagangan dan sarana ekonomi kota, yaitu beberapa pasar tradisional serta pusat perbelanjaan modern. Keadaan tersebut diharapkan dapat menarik minat masyarakat domestik yang berasal dari wilayah *hinterland* yang lebih kaya dibandingkan dengan kota Duri, Bagan Siapi-api, Bagan Batu, Bengkalis, Bukit Batu dan Rupat.

Perkembangan di atas memberikan kesan positif, yaitu kemajuan ekonomi daerah. Namun di saat bersamaan, didapati juga kesan

negatif seperti tingginya pertumbuhan penduduk yang diakibatkan oleh migrasi. Karena itu, angka pencari kerja atau tenaga kerja yang menganggur akan bertambah. Apabila hal ini tidak segera diselesaikan, maka akan terjadi peningkatan kesenjangan sosial diantara masyarakat Kota Dumai.

Sekarang ini, di Kota Dumai telah dibangun perusahaan-perusahaan besar. Pada tahun 1978, dibangun perusahaan minyak putri tujuh, yaitu perusahaan pengolah minyak milik negara. Oleh yang demikian, pendapatan dan penerimaan pencari kerja untuk perusahaan ini semuanya diputuskan oleh Pemerintah Pusat. Keadaan tersebut tidak memberikan peluang bagi penduduk untuk mempunyai *skill*/keahlian dalam bersaing di Kota Dumai, karena *skill*nya sangat rendah. Peluang yang ada hanya bekerja sebagai buruh/pekerja kasar dengan pendapatan yang lebih rendah.

Demikian juga di berbagai kawasan industri, telah dibangun beberapa perusahaan besar terutama perusahaan pengolah kelapa sawit yang bahan mentahnya didatangkan dari kota-kota yang berdekatan dengan Kota Dumai seperti Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak dan Kabupaten-Kabupaten dari Propinsi Sumatera Utara (Medan) yang kesemua tenaga pekerjanya berasal dari luar daerah.

Pada tahun 2004, dikeluarkan regulasi Pemerintah Kota Dumai berupa Peraturan Daerah (Perda) Kota Dumai Nomor: 10 Tahun 2004. Setiap perusahaan yang menjalankan usaha di Kota Dumai, wajib menggunakan tenaga pekerja lokal dengan rasio 70 persen berasal dari penduduk lokal dan 30 persen penduduk dari luar kota. Kelemahan yang ada sekarang ini adalah tenaga kerja lokal sebagian besarnya tidak mempunyai keahlian, sehingga upah yang diterima pun rendah.

Untuk memenuhi keperluan tenaga kerja yang sejalan dengan keinginan perusahaan, Pemerintah Kota Dumai belum dapat menyediakan tenaga pekerja lokal, apalagi tenaga kerja yang berasal dari penduduk miskin. Sementara itu, Pemerintah

Kota Dumai belum melakukan penyingkiran dalam menentukan calon tenaga kerja yang

datang dari luar daerah. Hal ini masih sebatas konsep yang baru akan dilaksanakan.

G. FAKTOR PENYEBAB KEMISKINAN DI KOTA DUMAI

Sebelum diberlakukannya sistem otonomi daerah tahun 1998, pernah dibuat satu kajian tentang kemiskinan di Kota Dumai tepatnya di Desa Basilam Baru (Desmaniar, 2002). Kajian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui gambaran keadaan kemiskinan dari 80 kepala rumah tangga di tempat berkenaan. Kajian juga dilakukan untuk mengetahui faktor penyebab kemiskinan di Kota Dumai. Tolak ukur untuk menilai kemiskinan di tempat kajian menggunakan pemikiran kemiskinan struktural, seperti sarana dan prasarana pendidikan, air bersih, kesehatan dan sarana pengangkutan. Sedangkan aspek budaya pula dilihat dari hakekat hidup, seperti karya manusia dan kedudukannya dalam ruang dan waktu, serta hakekat hubungan manusia dengan alam sekitar dan sesama manusia. Hasil kajian menjelaskan bahwa faktor budaya tidak signifikan pengaruhnya pada penyebab kemiskinan di Kota Dumai, melainkan aspek struktural menunjukkan bahwa faktor penyebab kemiskinan adalah berasal dari faktor luar serta tidak adanya kebijakan pemerintah yang berasal dari keinginan kalangan bawah atau masyarakat miskin. Oleh sebab itu, jawaban mengenai masalah kemiskinan tersebut adalah menyediakan sarana dan prasarana untuk membuka daerah baru.

Setelah otonomi daerah tahun 1999, dilakukan juga kajian kemiskinan di Kota Dumai oleh Sujianto (2009) yang berjudul „Kebijakan Pembebasan Kemiskinan, Tinjauan Budaya Lokal“. Hasil kajian menerangkan bahwa kemiskinan di Kota Dumai bukan saja bersifat perorangan, tetapi juga bersifat primordial kesukuan, tidak ada jaminan sosial, dan hidup di daerah terasing.

Potret kemiskinan masyarakat Kota Dumai dalam kajian ini boleh dilihat dari beberapa faktor:

1. Faktor dari dalam (internal), seperti perilaku, pilihan atau kemampuan seseorang dalam menjalani hidup.
2. Faktor dari luar (eksternal), seperti lingkungan sosial, lingkungan budaya,

deportasi pekerja ilegal dari negara tetangga, dan faktor struktural.

Tabel 6 menjelaskan faktor penyebab kemiskinan di Kota Dumai menurut Sujianto dalam kajiannya yang disebut di atas.

Tabel 6:
Faktor Penyebab Kemiskinan di Kota Dumai Menurut Sujianto

No.	Faktor	Item	Keterangan
1.	Internal	Faktor Mental	- Perilaku seseorang - Pilihan dalam melihat peluang - Kemampuan dalam menjalani hidup
		Faktor Penunjang	- Taraf ekonomi yang kurang - Pendidikan yang rendah - Sakit yang berkepanjangan
2.	Eksternal	Lingkungan Sosial dan Budaya	- Kebiasaan hidup yang menyimpang seperti narkoba dan mabuk - Ketidakmampuan orang tua dan anak untuk keluar dari lingkaran kemiskinan
		Struktural	- Kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada masyarakat miskin - Kurangnya perhatian Pemerintah Kota Dumai dalam peningkatan taraf hidup masyarakat di kota tersebut

Sumber: Sujianto (2009: 21)

H. UPAYA PEMERINTAH DAERAH MEMBERANTAS KEMISKINAN DI KOTA DUMAI

Secara prakteknya, Pemerintah Kota Dumai telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk kepentingan rakyat. Sektor pendidikan diarahkan kepada sekolah unggulan tingkat Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Biaya sekolah secara gratis diberikan kepada semua anak yang tergolong miskin pada tiga tingkatan di atas, yakni SD, SLTP dan SLTA. Pada sektor kesehatan pula, pengobatan secara gratis diberikan kepada semua penduduk yang berobat ke Puskesmas. Layanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) juga diberikan secara gratis kepada penduduk miskin khusus untuk kelas tiga. Untuk meringankan beban hidup penduduk miskin juga diberikan bantuan berupa beras miskin (Raskin), uang santunan bagi yang meninggal dunia, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, izin berdagang, rumah layak huni secara bertahap dan bantuan uang pada hari-hari besar keagamaan.

Dalam sektor pendidikan, telah dibuat berbagai jenis layanan pendidikan tinggi di Kota Dumai, seperti Sekolah Tinggi Ilmu

Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam, Sekolah Tinggi Teknologi, Marine Science UNRI, Akademi Perawat dan Kebidanan Sri Bunga Tanjung, dan Akademi Komputer.

Kota Dumai mempunyai sarana penunjang pemerintah dan layanan masyarakat melalui pola *“turnkey project”*, yaitu Mesjid Raya Al-Manan, Gedung DPRD, Pejabat Walikota, stasiun barang di Bukit Jin dan stasiun AKAP di Kelakap Tujuh. Kota Dumai juga mempunyai lima kawasan industri, yaitu kawasan industri Pelintung, kawasan industri Lubuk Gaung, kawasan industri Bukit Timah, kawasan industri Bukit Kapur dan kawasan pengembangan terpadu Dock Yard. Kawasan industri yang paling cepat berkembang ialah kawasan industri Pelintung.

Untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Dumai membangun Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) yang diharapkan bisa memberikan layanan kepada masyarakat secara lebih baik. Di samping itu, Kota Dumai mempunyai sarana penunjang perdagangan dan sarana ekonomi kota, yaitu beberapa pasar tradisional dan satu pasar modern.

Pembangunan dilaksanakan selama ini yang ditunjukkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Dumai

sejak tahun 1999 hingga tahun anggaran 2001 relatif sangat kecil. Hal ini disebabkan masa peralihan awal periode otonomi daerah di pemerintahan Kota Dumai. Pelaksanaan otonomi daerah juga dipandang belum maksimal, terutama pembagian anggaran atau uang pembangunan serta wewenang merencanakan dan menjalankan pembangunan. Walaupun anggaran pembangunan masih kecil dan wewenang masih terbatas, tetapi mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan tetap mengikuti peraturan atau regulasi yang ada yang sebagian besarnya dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Bermula dari tahun anggaran 2002 hingga tahun 2010, kewenangan otonomi daerah semakin jelas dan pembagian keuangan pembangunan pun semakin besar. Oleh karena itu, otonomi daerah bisa dijalankan secara penuh oleh Pemerintah Kota Dumai. Kenyataannya, Pemerintah Kota Dumai melaksanakan pembangunan dengan bersandarkan kepada sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang telah ditetapkan, sehingga hal tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Seiring dengan perubahan ketentuan dari Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan otonomi daerah, maka pembangunan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2005, pimpinan daerah atau kepala daerah selama kurun waktu enam bulan setelah dilantik harus membuat dokumen strategi perencanaan atau disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2006-2011. Dokumen inilah yang menjadi pedoman operasional pembangunan oleh semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membantu kepala daerah melaksanakan pembangunan di berbagai bidang dan sektor untuk kepentingan penduduk Kota Dumai.

Dari berbagai bidang dan sektor pembangunan, Pemerintah Kota Dumai mengelompokkan menjadi 2 (dua) urusan, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Adapun diantara keutamaannya ialah memberantas kemiskinan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 diantara prioritas programnya ialah mengatasi masalah kemiskinan dan setiap tahun dikeluarkan pula Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan/Percepatan Penanggulangan Kemiskinan baik tingkat Pemerintahan Pusat, Propinsi maupun pada tingkat Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk merealisasikan peraturan pemerintah di atas, dikeluarkan pula peraturan Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota tentang pengentasan kemiskinan di daerah. Berbagai program pengentasan kemiskinan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Namun keuangan dan jenis kegiatan yang dibagikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah berbeda antara satu dengan yang lainnya. Diantara program yang dimaksud adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan (PNPM-P), Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Pengembangan Kawasan Terpadu (P2KT), bantuan sosial untuk orang cacat fisik, orang lanjut usia, dan anak terlantar.

Di samping itu, ada juga beberapa program atau kegiatan dari Pemerintah Pusat yang disamaratakan untuk seluruh Pemerintah Kota atau Pemerintah Daerah, seperti kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp. 100.000.- setiap bulan untuk kepala rumah tangga miskin, bantuan beras sebanyak 15 kg untuk setiap kepala rumah tangga miskin, biaya berobat secara gratis bagi setiap penduduk miskin, Biaya Operasional Sekolah (BOS) untuk meringankan beban para pelajar miskin dari tingkatan dasar (SD) hingga tingkatan atas (SLTA).

Selain dari kegiatan memberantas kemiskinan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat di atas, Pemerintah Daerah dapat menyediakan anggaran bagi kegiatan lainnya untuk penduduk miskin lokal (TKPK Kota Dumai, 2007). Oleh karena itu, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

(TKPK) Pemerintah Kota Dumai berinisiatif membuat anggaran untuk 2 (dua) tujuan:

1. Mengurangi beban belanja kepala rumah tangga miskin dengan kegiatan:
 - a. Pemberian santunan orang miskin yang meninggal dunia sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) bila yang meninggal kepala rumah tangga miskin, Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bila yang meninggal dunia isteri kepala rumah tangga miskin, dan sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) bila yang meninggal dunia anak atau yang menjadi tanggungan kepala rumah tangga miskin bersangkutan. Program ini berjalan sejak tahun 2007 hingga tahun 2008.
 - b. Pemberian bantuan uang untuk anak miskin berprestasi sebagai juara pertama sampai juara kelima di sekolah sesama pelajar miskin. Program ini mulai diaplikasikan sejak tahun 2007 hingga tahun 2009.
 - c. Dalam bidang infrastruktur, secara bertahap dibangun rumah layak huni untuk penduduk miskin dengan nilai sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) setiap satu rumah. Program ini berjalan sejak tahun 2007 hingga tahun 2010.
 - d. Subsidi beras miskin (Raskin). Pemberian raskin tidak semuanya dibiayai oleh Pemerintah Pusat. Setiap satu kilogram raskin, kepala rumah tangga miskin mesti membayar uang sebesar Rp. 1.600.- (seribu enam ratus rupiah) dari harga beras perkilogram rata-rata sebesar Rp. 4.966. Oleh karena itu, uang sebesar Rp. 1.600 dianggarkan pada APBD Kota Dumai, sehingga pembagian beras miskin menjadi gratis keseluruhannya. Program ini dilaksanakan sejak tahun 2007 hingga tahun 2010.
 - e. Layanan nikah secara massal dan akte kelahiran gratis untuk penduduk sejak tahun 2008 hingga tahun 2010.

2. Meningkatkan ekonomi penduduk miskin. Program awal yang dilakukan ialah menyediakan data penduduk miskin yang sangat rinci dan satu diantaranya adalah data mata pencarian atau pekerjaan penduduk miskin. Apabila penduduk miskin memiliki pekerjaan, maka ia akan dibina secara profesional oleh SKPD sesuai tugas dan fungsinya, misalnya penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian, maka SKPD Dinas Pertanian Tanaman, Perkebunan dan Kehutanan Kota Dumai bertanggung jawab untuk melaksanakan programnya. Bila penduduk miskin bekerja pada sektor peternakan, maka SKPD Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai yang bertanggung jawab menjalankannya. Apabila penduduk miskin bekerja sebagai pedagang kecil, *home* industri, maka SKPD Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Berikutnya, bila penduduk miskin tidak mempunyai pekerjaan tetap atau menganggur, maka SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Apabila penduduk miskin merupakan kelompok terlantar, maka yang bertanggungjawab menjalankannya adalah Dinas Sosial Kota Dumai.

Selanjutnya, program lain yang berjalan sejak tahun 2007 sampai tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan lembaga ekonomi melalui Usaha Ekonomi Kerakyatan Simpan Pinjam (UEK-SP) di setiap Kelurahan. Fungsi UEK-SP ialah memberikan bantuan modal usaha kepada kepala rumah tangga miskin sebesar Rp. 500.000.000. (lima ratus juta rupiah). Uang ini dikelola kelompok masyarakat yang ditunjuk oleh masyarakat lokal.

Uang tersebut dibagikan kepada masyarakat lokal yang memerlukan modal

usaha dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Program ini dilaksanakan secara bergulir (*revolving*).

2. Menyediakan bibit tanaman padi, palawija dan kelapa sawit, yang dibagikan kepada masyarakat miskin sesuai keperluan.
3. Mendistribusikan bibit ternak dan sarana yang diperlukan, dan
4. Melatih pencari kerja yang dipilih sesuai dengan keperluan.

Kedua tujuan program pemberantasan kemiskinan Kota Dumai tersebut di atas, TKPK Kota Dumai pada tahun 2007 merumuskan satu konsep pelaksanaannya melalui pola *Three-T* (3T), yaitu Terencana (*planning*), Terukur/Sasaran (*target group*) dan Terpadu (*integrated*). Penjelasan konsep 3T tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terencana (*planning*). Program yang disusun sudah disiapkan secara komprehensif dan sudah dihitung dampak dan akibatnya dengan langkah-langkah:
 - a. Perencanaan dan pembahasan program internal oleh institusi dinas atau SKPD bersangkutan.
 - b. Pembahasan usulan rencana program atau kegiatan bersama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Dumai yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Dumai.
 - c. Usulan dan pembahasan program atau kegiatan dengan BAPPEDA selaku institusi atau SKPD yang bertanggungjawab menyusun keseluruhan program pembangunan Kota Dumai.
2. Terukur sasaran (*target group*) dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana sasaran penduduk miskin oleh institusi dinas/SKPD bersangkutan.
 - b. SKPD menyesuaikan dan menentukan nama serta alamat penduduk miskin di lokasi yang telah ditetapkan.

- c. Menyusun daftar sasaran penduduk miskin.
- d. Pembahasan internal institusi dinas/SKPD dari *target group*.
- e. Penyampaian nama dan alamat *target group* penduduk miskin kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Dumai.
- f. Pembahasan akhir sasaran penduduk miskin sesuai dengan nama dan alamat (*target group*) antara institusi dinas/SKPD dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Dumai.

3. Terpadu (*Integrated*), Keterpaduan program antar SKPD yang melaksanakan program pemberantasan kemiskinan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) memfasilitasi pembahasan antar SKPD yang akan melaksanakan program/kegiatan pengentasan kemiskinan.
 - b. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Dumai memfasilitasi pembahasan kesepakatan dan kesefahaman tugas masing-masing SKPD dalam rangka menyesuaikan program/kegiatan.
 - c. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Dumai menyampaikan tugas masing-masing SKPD untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan pengentasan kemiskinan yang terintegrasi.
 - d. Evaluasi internal TKPK terhadap hasil pekerjaan/kegiatan dan pembinaan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing SKPD.
 - e. Evaluasi bersama melalui rapat antara TKPK dengan semua SKPD yang telah melaksanakan program/kegiatan pengentasan kemiskinan.

f. Memperbaiki program atau kegiatan untuk tahun anggaran selanjutnya oleh SKPD yang bersangkutan.

terukurnya sasaran dan jumlah yang tepat penduduk miskin untuk dibebaskan dari lingkaran kemiskinan.

Sebagai gambaran besarnya alokasi dana dan jenis kegiatan program pengentasan kemiskinan kota Dumai dengan pola rutinitas sektoral tahun anggaran 2011-2014 dapat dilihat tabel-tabel berikut ini.

Namun, pola ini tidak lagi diteruskan, tetapi lebih menggunakan pola rutinitas sektoral oleh masing-masing SKPD. Kondisi ini terutama berdampak kepada tidak

Tabel 7:
Program Pembasmian Kemiskinan di Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Dumai Tahun Anggaran 2011

No	SKPD	Program / Kegiatan	Jumlah Sasaran	Jumlah Dana Anggaran (Rp)	Sumber Biaya
1.	Dinas Koperasi UKM dan PM	Fasilitasi Pengembangan usaha kecil menengah dengan target 5 sentra bisnis UKM	7 Kecamatan	342.377.300	APBD Kota Dumai
2.	Dinas Perikanan dan Kelautan	- Pendistribusian Bibit Ternak - Budidaya kolam plastik di lahan pekarangan	130 KIM 92 KIM	1.594.146.125 551.675.000	APBD Kota Dumai
3.	Dinas Kesehatan	- PMT Pemulihan Balita	100 orang	89.080.200	APBD Kota Dumai
4.	Dinas Tanaman dan Kehutanan	Peningkatan sistem Intensif dan disentif bagi Petani/ kelompok tani	190 KK	993.675.000	APBD Kota Dumai
5.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	75 orang	437.356.800	APBD Kota Dumai
6.	Dinas Pendidikan	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini/penyediaan biaya operasional Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin.	12 bulan 12 bulan	184.161.000 450.000.000	APBD Kota Dumai APBD Kota Dumai
7.	Dinas Sosial	- Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi kelurga miskin. - Penyuluhan ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera (P2WKSS)	7 kec	57.625.000 66.888.350	APBD Kota Dumai APBD Kota Dumai
8.	BKBPPA	- Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha (UP2K)	35 orang	43.723.600	APBD Kota Dumai
JUMLAH				4.810.708.375	

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Kota Dumai, 2011

Tabel 8:
Program Pembasmian Kemiskinan di Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Dumai Tahun Anggaran 2012

No	SKPD	Program / Kegiatan	Jumlah Sasaran	Jumlah Dana Anggaran (Rp)	Sumber Biaya
----	------	--------------------	----------------	---------------------------	--------------

1	Dinas Koperasi UKM dan PM	Fasilitasi Pengembangan usaha kecil menengah dengan target 5 sentra bisnis UKM	Semua UKM	243.355.000	APBD Kota Dumai
2	Dinas Perikanan dan Kelautan	- Pendistribusian Bibit Ternak - Budidaya kolam plastik di lahan pekarangan	130 KIM 120 KIM	1.594.146.125 640.104.900	APBD Kota Dumai APBD Kota Dumai
3	Dinas Kesehatan	- PMT Pemulihan Balita - Pelayanan kesehatan - penduduk miskin dan jaringannya	200 orang 9 PKM	97.020.000 106.680.000 1.381.550.500	APBD Kota Dumai APBD Kota Dumai
4	Dinas Tanaman dan Kehutanan	Peningkatan sistem Intensif dan disentif bagi Petani/ kelompok tani	210 KK	437.356.800	APBD Kota Dumai
5	Dinas Tenaga Kerja dan Trans- migrasi	Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	75 orang	10.495.000	APBD Kota Dumai

6	Dinas Pendidikan	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini /penyediaan biaya operasi-onal	10 hari	228.450.000	APBD Kota Dumai
7	Dinas Sosial	- Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin.	12 bulan	41.850.000	APBD Kota Dumai
8	BKBPPA	- Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin. - Penyuluhan ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera (P2WKSS) - Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha (UP2K)	7 kec 45 orang	84.972.500 82.628.450	APBD Kota Dumai
JUMLAH				4.948.609.275	

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Kota Dumai, 2012

Tabel 9:
Program Pembasmian Kemiskinan di Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Dumai Tahun Anggaran 2013

No	SKPD	Program / Kegiatan	Jumlah Sasaran	Jumlah Anggaran	Sumber Biaya
1	Dinas Koperasi UKM dan PM	Fasilitasi Pengembangan usaha kecil menengah	7 kecamatan	284.278.500	APBD Kota Dumai
2	Dinas Perikanan dan Kelautan	- Pendistribusian Bibit Ternak - Budidaya kolam plastik di lahan pekarangan	39 KK 4 KK	249.618.375 12.080.500	APBD Kota Dumai
3	Dinas Kesehatan	- PMT Pemulihan Balita - Pelayanan kesehatan penduduk miskin dan jaringannya	60 orang 9 PKM	76.191.840 106.680.000	APBD Kota Dumai APBD Kota Dumai
4	Dinas Tanaman dan Kehutanan	Peningkatan sistem Intensif dan disentif bagi Petani/ kelompok tani	9423 KK	716.290.000	APBD Kota Dumai
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	1 paket	119.972.500	APBD Kota Dumai
6	Dinas Pendidikan	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini /penyediaan biaya operasional	56 orang	152.385.000	APBD Kota Dumai
7	Dinas Sosial	- Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya penanggulangan kemiskinan (Raskin)	2 sekolah	4.537.041.000	APBD Kota Dumai
8	BKBPPA	- Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan Pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin. - Penyuluhan ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera (P2WKSS) - Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha (UP2K)		210.378.500 544.236.150 257.918.400	APBD Kota Dumai APBD Kota Dumai
JUMLAH				7.087.070.765	

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Kota Dumai, 2013

Tabel 10:
Program Pembasmian Kemiskinan di Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Dumai Tahun Anggaran 2014

No	SKPD	Program / Kegiatan	Jumlah Sasaran	Jumlah Anggaran	Sumber Biaya
1	Dinas Kesehatan	Pelayanan kesehatan penduduk miskin dan jaringannya	1 tahun	2.851.315.000	APBD Kota Dumai
2	Dinas Tanaman dan Kehutanan	Peningkatan sistem Intensif dan disentif bagi Petani/ kelompok tani	25 orang	547.340.000	APBD Kota Dumai
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	96 orang	162.720.000	APBD Kota Dumai
4	Dinas Pendidikan	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini /penyediaan biaya operasi-onal	2 sekolah	133.705.000	APBD Kota Dumai
5	BKBPPA	- Penyuluhan ibu rumah tangga dalam mem-bangun keluarga seja-h-tera (P2WKSS)		697.722.100	APBD Kota Dumai
		- Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha (UP2K)		276.383.200	APBD Kota Dumai
JUMLAH				4.169.185.3	

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Kota Dumai, 2014

Tabel-tabel di atas menunjukkan bahwa program penanggulangan kemiskinan di Kota Dumai dilaksanakan secara serentak dan saling berkaitan antara satu dinas dengan dinas lainnya dalam ruang lingkup Pemerintah Kota Dumai.

PENUTUP

Pemerintah Kota Dumai telah melakukan pembangunan daerah khususnya yang berkaitan dengan pemberantasan kemiskinan sejak otonomi daerah tahun 1999. Walaupun program yang dilaksanakan berjalan efektif setelah tiga tahun otonomi daerah diberlakukan, namun hingga saat ini pelaksanaannya masih terus ditingkatkan dan diperbaiki. Hal ini karena tujuan memberantas kemiskinan belum berjalan secara maksimal sebagaimana diuraikan dalam penjelasan sub topik sebelum ini.

Kebijakan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan melalui program pemberantasan kemiskinan lebih difokuskan pada 3 (tiga) bidang penting; yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Ketiga

bidang ini diyakini mampu untuk menaikkan taraf hidup warga dan mengurangi angka kemiskinan di Kota Dumai. Namun demikian, program yang sedang dilakukan hingga saat ini perlu lebih dimantapkan, disamping kerjasama dari seluruh kalangan masyarakat baik kalangan atas hingga masyarakat kalangan bawah yang tinggal di pedesaan.

Akhirnya, kita semua berharap bahwa program pemberantasan kemiskinan di Indonesia umumnya dan di Kota Dumai khususnya bukan saja menjadi tanggung jawab para pemimpin yang memegang tampuk pemerintahan, namun merupakan amanah seluruh warga yang hidup di dalamnya. Oleh karena itu, pengembangan taraf hidup ke arah yang lebih baik menjadi tugas bersama baik dari unsur kebijakan melalui program pemberantasan kemiskinan sampai kesadaran masyarakat untuk mau bekerja dan merubah pola hidup menjadi masyarakat madani yang disegani oleh masyarakat di daerah-daerah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abul Hasan M. Sadeq (2002), "Poverty Alleviation an Islamic Perspective". *Humanomics*, vol. 14, no. 3/4, 1997.
- _____ (2007), "Poverty alleviation and Economic Development: Theory and Practice, A Paper presented in First International Conference on Inclusive Islamic Financial Sector Development". Brunei: organized by IRTI and CIBFM, 17-19 April 2007.
- Achmad Efendi (2011), *Estimation Methodology and Model Verification for Hierarchical and Overdispersed Time-to-event Outcomes*. Doctoral Thesis in Biomedical Sciences.
- ADB (1999), *Fighting Poverty in Asia and The Pacific; The Poverty Reduction Strategy of The Asian Development Bank*. Mimeo.
- Amartya Sen (1981), *Poverty and Famines An Essay on Entitlement and Deprivation*. Oxford: Clarendon Press.
- _____ (2011), *Peace and Democratic Society*. Cambridge, UK: Open Book Publishers.
- Belfield, Chris et. al (2015), *Living Standards, Poverty and Inequality in the UK*. London: The Institute for Fiscal Studies.
- Chamhuri Siwar dan Nor Aini Hj. Idris (1996), *Kemiskinan dalam arus pembangunan ekonomi Malaysia*. Bangi: Kebangsaan Malaysia.
- Chopra (1985), "Tack behavior of coating solutions III", Volume 74, Issue 7 July 1985, *Journal of Pharmaceutical Sciences*.
- _____ (1992), *Glossary of Indian Medicinal Plants*. New Delhi: Council of Scientific and Industrial Research.
- Dadang Juliantara (2004), *Pembaruan Desa Pertumpuan Pada Yang Terbawah*. Yogyakarta: Laporan Pustaka Utama.
- Dadang S.Ansori (2002), "Reaksi Desa, Pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)". *Pikiran Rakyat*, <http://www.pikiranrakyat.com/cetak/0703/110802.htm>, diakses 2 Ogos 2011.
- Desmaniar (2002), *Faktor-Faktor Penyebab Miskinnya Desa Basilam Baru, Riau*, Dokumen Tesis Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, <http://www.google.co.id/search?hl=id&source=hp&ie=ISO-8859-1&q=kemiskinan+di+Amerika+Latin&meta=diakses+pada+12+Maret+2010>.
- Detik Finance, Mei 2014.
- Domar E.D (1945), "The Problem of Capital Accumulation", *American Economic Review*, 37.
- Edi Suharto (2009), *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia; Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Frank, Andre Gunder (1967), *The Underdevelopment of Development*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Friedman, John (1979), *The Good Society*. Cambridge: MIT Press.
- Ghazali, al- (1994), *Man is the Basis of the Islamic Strategy for Economic Development*. Jeddah: IRTI-IDB.

- Gordon, David (2005), *Indicators of Poverty & Hunger*. New York: United Nations Headquarters.
- Harrod, Roy F (1939), "An Essay in Dynamic Theory", *Economic Journal*, 49.
- Ismail Sirageldin (2000), "Elimination of Poverty: Challenge and Islamic Strategies", (Kertas Kerja International Conference on Islamic and Banking, UK, 13-15 Ogos 2000).
- Jamasy (2004), *Keadilan, Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan*. Belantika: S.
- Jeremy, Seabrook (2006), *Kemiskinan Global; Kegagalan Model Ekonomi Neoliberalisme*. Yogyakarta: Resiste Book.
- Kamal Salih (1984), "Konsep, Definisi dan Pengukuran Kemiskinan", dalam Alladin Hashim *et al.* (ed.), *Kemiskinan Luar Bandar*. Kuala Lumpur: AIM.
- Lewis, Oscar (1966), "The Culture of Poverty", Volume 215 Number 4, *Establish American*.
- Lewis W.A (1954), "Economic Development with Unlimited Supplies of Labour", *Manchester School*, 22.
- M. Syukri Salleh (1994), "Kemiskinan dan Pembangunan: Berfikir Semula Secara Islam". (Kertas Kerja Seminar Kebangsaan Geografi Malaysia, 17-19 Ogos 1994), anjuran bahagian Geografi Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan Universiti Sains Malaysia (USM).
- Mohd. Taib Dora (1997), *Golongan Termiskin: Sampai Bila Perlukan Bantuan?*. FPPSM UTM.
- Mohamad Khairudin Mohamad dan Ahmad Syahir Sarani (2004), *Pembasmian Kemiskinan Bandar dan Luar Bandar*, cet. 1. Petaling Jaya: Institut Perkembangan Minda.
- Muhammad Ridwan (2014), "Penanggulangan Kemiskinan: Miskin Kinerja?", <http://p2kp.org/wartadetil.asp?mid=6432&catid=2&>, diakses 12 April 2014.
- Mulyanto Sumardi (1990), *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*. Jakarta: Rajawali.
- Nasseri Taib (1990), *Islam and Eradication of Poverty; an Ethical Dimension of Development with Special Reverence to Malaysia's Five Years Plans*. (Ph.D Dissertation, Temple University).
- Nugroho, Iwan dan Dahuri (2004). *Pembangunan Wilayah, Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.
- Osman Rani Hassan dan Abdul Majid Salleh (1988), "Konsep-Konsep Kemiskinan dan Ketaksamaan: Satu Tinjauan", dalam Chamhuri Siwar dan Mohd Haflah, *Isu, Konsep dan Dimensi Kemiskinan (Kumpulan Rencana Tentang Kemiskinan)*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.sen.
- Qardhawi, Yusuf, al- (1997), *Fatwa-fatwa Kontemporer*, cet. ke-4, Jakarta: Gema Insani Press.
- _____ (2009), *Halal dan Haram Menurut Perspektif Islam*, Terj. Abu Jabir Muhammad, Edisi 2. Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa.
- Saifur Rohman (2011), "Memaknai Ekonomi Tiwul," *Harian Terbit Kompas*.
- Sensus Penduduk Tahun 2014.
- Smith, Adam (1776), *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, Edisi Pertama. London: W. Strahan. Retrieved.

Soerjono Soekanto (1995), *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- _____ (2011), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cet. Ke-10. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Solow, R. (1957), "Technical Change and The Aggregote Production Function" *Review of Economics and Statistic*, 39.
- Sujianto (2009), *Kebijakan Pembebasan Kemiskinan Masyarakat Perkotaan: Tinjauan Budaya Lokal*. Pekanbaru: AlafRiau.
- Syahrizal (2006), *Strategi Buruh Perkebunan Mengatasi Kemiskinan: Studi di Perkebunan Teh PT. Mitra Kerinci Sumatera Barat*. Padang: Andalas University Press.
- Syamsiah Badruddin (2009), "Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial di Indonesia Pra dan Pasca Runtuhnya Orde Baru", <https://profsyamsiah.wordpress.com/2009/04/23/49/>, diakses pada 21 Januari 2011.
- Todaro, Michael P (1996), *Economic Development*. New York: Addison-Wesley Publishing Company.
- Townsend, Peter (1979), *Poverty in the United Kingdom*. London: Penguin Books Ltd..
- United Nations (1995), *The Copenhagen Declaration and Programme of Action*. World Summit for , 6-12 March 1995, New York: United Nation.
- _____ (2004), *Economic and Social Survey of Asia and The Pacific 2004*.

